

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

---

**IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT-  
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK DI KOTA PEKANBARU (STUDI DI  
KELURAHAN LEMBAH SARI KECAMATAN RUMBAL PESISIR)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat*

*Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu*

*Program Studi Ilmu Pemerintahan*

*Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*

*Universitas Islam Riau Pekanbaru*



**Rezenita Anggoro Prasetyari**

**NPM : 177310068**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat ALLAH SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, ” **Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat- *Islamic Development Bank* di Kota Pekanbaru (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)** “. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat, dorongan serta doa yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku ketua prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andriyus,S.Sos, M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini.
5. Seluruh Dosen-Dosen Khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosisal dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua ilmu yang dimiliki kepada penulis.
6. Dan terimakasih juga kepada Ayahanda Didik Eko Prasetyo dan Ibunda Jariatun tersayang yang telah berjasa bersusah payah membesarkan,

membina, terimakasih untuk pengorbanan selama ini kepada penulis, dan memenuhi permintaan penulis selama dalam menyelesaikan penelitian, adik Galang Prasetyo yang selalu mendampingi penulis.

7. Seluruh informan di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir yang bersedia memberikan informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis, serta kepada Yogi Setiawan yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, kepada Meliana Nafiya, Restyana Agustya Dewi, Ayu Siti Chotijah, Fatma Dewi, Fia Dwi Ristianti yang selalu mendukung dan menemani penulis dari awal hingga saat akhir penyusunan Skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini mendapat keridhaan dari ALLAH SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, amin ya ALLAH.

Pekanbaru, 03 Februari 2021

Penulis

Rezenita Anggoro Prasetyari

NPM:177310068

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	20
1. Tujuan Penelitian.....	20
2. Kegunaan Penelitian.....	20
<b>BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....</b>	<b>22</b>
A. Studi Kepustakaan.....	22
1. Konsep Pemerintahan.....	22
2. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	25
3. Konsep Kebijakan Publik.....	26
4. Konsep Implementasi Kebijakan.....	28
5. Teori Implementasi Kebijakan.....	29



6. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat .....	33
7. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal .....	36
B. Perbandingan Penelitian Terdahulu .....	37
C. Kerangka Pikir .....	39
D. Konsep Operasional .....	41
E. Operasional Variabel.....	43
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Tipe Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Informan dan Key Informan.....	46
D. Teknik Pemilihan Informan .....	47
E. Jenis dan Sumber Data.....	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	50
<b>BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	51
1. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru .....	51
2. Letak Geografis Kota Pekanbaru .....	52
B. Gambaran Umum Kecamatan Rumbai Pesisir.....	53
C. Kelurahan Lembah Sari.....	54
1. Gambaran Umum Kelurahan Lembah Sari .....	54
2. Letak Geografis Kelurahan Lembah Sari .....	54
3. Kondisi Demografi Kelurahan Lembah Sari.....	55
1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur .....	55
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Lembah Sari.....	56
D. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.....	57
<b>BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>

A. Identitas Responden .....	71
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	71
2. Identitas Responden Berdasarkan Umur .....	72
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan .....	72
B. Implementasi Program SANIMAS- <i>IDB</i> .....	73
C. Hambatan-hambatan dalam implementasi program SANIMAS- <i>IDB</i> .....	124
<b>BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	115
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran-Saran .....	116
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	117
<b>LAMPIRAN</b> .....	120

## DAFTAR TABEL

I.1 : <i>Best Practice</i> program SANIMAS- <i>IDB</i> di Indonesia.....	9
I.2 : Jumlah Wilayah Sasaran Pembangunan Ipal Di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2019.....	12
I.3 : Calon Pemanfaat Program SANIMAS di Rt 01 Rw 01 Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir.....	17
I.4 : Kondisi Kesehatan Masyarakat Rt 01 Rw 01 Kelurahan Lembah Sari .....	18
II.1 : Konsep Operasional Variabel Implementasi Program SANIMAS- <i>IDB</i> .....	43
III.1 : Informan dan Key Informan Penelitian .....	47
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Implementasi Program SANIMAS- <i>IDB</i> .....	51
IV.1 : Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2020.....	53
IV.2 : Nama Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir.....	54
IV.3 : Tinggi Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir 2020.....	55
IV.4 : Jumlah Penduduk Kelurahan Lembah Sari Berdasarkan Jenis Kelamin.....	57
IV.5 : Jumlah Penduduk Kelurahan Lembah Sari Berdasarkan Umur .....	58
V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	74
V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur .....	75
V.3 Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan .....	75

## DAFTAR GAMBAR

I.1 : Organisasi Pelaksana Program SANIMAS.....	11
II.1 : Kerangka Pikir Implementasi Program SANIMAS- <i>IDB</i> .....	40
IV.1: Struktur Organisasi Kelurahan Lembah Sari.....	59
IV.2 : Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkrim Kota Pekanbaru.....	61





## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rezenita Anggoro Prasetyari  
NPM : 177310068  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Penelitian : Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat-  
*Islamic Development Bank* di Kota Pekanbaru (Studi di  
Kelurahan Lembah Sari Rumbai Pesisir)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.



Pekbaru, 03 Februari 2021  
Pelaku Pernyataan,

*Rezenita Anggoro Prasetyari*  
Rezenita Anggoro Prasetyari

**IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT-  
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK DI KOTA PEKANBARU (STUDI DI  
KELURAHAN LEMBAH SARI KECAMATAN RUMBAI PESISIR)**

**ABSTRAK**

**REZENITA ANGGORO PRASETYARI**

**Kata Kunci: Implementasi, Sanitasi Berbasis Masyarakat-IDB, IPAL  
Komunal**

Program Sanitasi Berbasis Masyarakat-*Islamic Development Bank* adalah bentuk kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka upaya pencapaian target Millennium Development Goals dan *universal acces* air minum dan sanitasi yang tercantum didalam Peraturan Presiden Nomor. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang dibiayai oleh bantuan dari *Islamic Development Bank*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program SANIMAS-IDB dan untuk melihat faktor penghambat pelaksanaan program di Kelurahan Lembah Sari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Indikator yang digunakan meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Informan dalam penelitian ini adalah Lurah Lembah Sari, Ketua KSM, Ketua KPP, Ketua Rt 01 Rw 01, dan masyarakat di Rt 01 Rw 01 sedangkan key informannya adalah Pejabat Pembuat Komitmen Program SANIMAS-IDB Dinas Perkrim Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini adalah Implementasi Program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari sudah berjalan namun dalam penyelenggaraannya masih ditemukan hambatan seperti masih minimnya sosialisasi, kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana, sulitnya menyadarkan dan membangun kerjasama dengan masyarakat dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB.

**IMPLEMENTATION OF COMMUNITY-BASED SANITATION  
PROGRAMS - ISLAMIC DEVELOPMENT BANK IN PEKANBARU CITY  
(STUDY IN KELURAHAN LEMBAH SARI KECAMATAN RUMBAL  
PESISIR)**

**ABSTRACT**

**REZENITA ANGGORO PRASETYARI**

**Keywords:** *Implementation, Community Based Sanitation-IDB, IPAL Communal*

*The Community Based Sanitation Program-Islamic Development Bank is a form of government policy implemented by the Ministry of Public Works in an effort to achieve the Millennium Development Goals and universal access to drinking water and sanitation as stated in Presidential Regulation No. 2 of 2015 concerning the 2015-2019 RPJMN which is financed by assistance from the Islamic Development Bank. The purpose of this study was to determine the implementation of the SANIMAS-IDB Program and to see the factors inhibiting the implementation of the program in Lembah Sari Village. This study uses a qualitative method. The indicators used include standards and policy objectives, resources, characteristics of the implementing organization, attitudes of the implementers and the social, economic and political environment. The informants in this study were the Head of the Lembah Sari Urban Village, the Head of KSM, the KPP Chair, the Head of Rt 01 Rw 01, and the community at Rt 01 Rw 01, while the key informant was the Commitment Making Officer for the SANIMAS-IDB Program of the Perkrim Office of Pekanbaru City. The results of this study are that the implementation of the SANIMAS-IDB Program in Lembah Sari Village has been running, but in its implementation there are still obstacles such as lack of socialization, lack of coordination between executors, difficulty in awakening and building cooperation with the community in implementing the SANIMAS-IDB program.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang melakukan penyelenggaraan dalam pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya sendiri, pemerintah daerah merupakan pihak yang menyelenggarakan perekonomian, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dalam pelaksanaannya pemerintah harus bertanggung jawab dan terbuka dalam mengelola keuangan supaya terwujud pelaksanaan pemerintahan yang bersih (Setyaningrum, 2012).

Adanya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan kekuatan daerah untuk meningkatkan kemampuannya di segala aspek, semua hal mengenai kemajuan daerah tersebut diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk dilakukan pengelolaan baik di provinsi, kabupaten maupun kota, penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat maupun daerah terbagi dua yaitu urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pemerintahan pilihan yaitu urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh daerah sesuai kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan pasal 9 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah urusan kepada pemerintah daerah



yang terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum, meliputi :

1. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
3. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berikut merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terbagi menjadi dua yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib meliputi :

1. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
  - a. Pendidikan
  - b. Kesehatan
  - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang**
  - d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
  - e. Social
2. Urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
  - a. Tenaga kerja
  - b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan dan
- r. Kearsipan

Secara global permasalahan lingkungan di seluruh Dunia adalah masalah sanitasi lingkungan yang diperkirakan 1,1 Miliar penduduk di Dunia tidak memiliki akses terhadap air bersih dan 2,6 Miliar orang kekurangan sanitasi yang memadai (Vita Elysia, 2018) terutama di Negara berkembang yang memiliki beberapa faktor diantaranya, sebagai berikut (Dika & Yustini, 2019):

1. Kurangnya perhatian dari pemerintah atau dinas yang berkaitan dengan sanitasi
2. Kurangnya perilaku hidup bersih pada masyarakat

3. Sarana sanitasi yang kurang memadai di tempat-tempat umum (sekolah, rumah sakit, puskesmas, masjid, restoran dan lain-lain)

Menurut WHO Pada tahun 2017, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dengan negara yang memiliki akses sanitasi terburuk setelah India dan Tiongkok, sedangkan negara di kawasan asia tenggara dengan akses sanitasi yang baik adalah Singapura dan Malaysia. Sanitasi layak di Indonesia mencapai 62,14 persen (40,76 juta rumah tangga) masih jauh tertinggal dari Negara tetangga. (Bayu, 2019, <https://independen.id/read/khusus/911/sinergi-dan-kolaborasi-atasi-sanitasi/#:~:text=WHO%20menyebut%2C%20Indonesia,Fasilitas%20air%20minum%20dan%20sanitasi>).

Tantangan pembangunan program sanitasi yang ada di indonesia adalah perilaku dan sosial budaya penduduk yang terbiasa buang air besar di sembarang tempat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat akan memberikan dampak negatif terhadap penurunan kualitas lingkungan, meningkatkan konsumsi air bersih yang menimbulkan kenaikan jumlah air limbah, pembuangan limbah apabila tidak melalui proses pengelolaan yang baik akan mengakibatkan pencemaran air permukaan sungai, air tanah maupun danau sehingga memerlukan upaya pembangunan sanitasi yang layak dan memenuhi persyaratan kesehatan.

Di Indonesia masih banyak Provinsi dengan akses sanitasi yang belum memadai salah satunya Provinsi Riau namun Provinsi di Indonesia yang memiliki akses sanitasi dasar terendah adalah Nusa Tenggara Timur, Papua dan Kalimantan Tengah sedangkan untuk akses dasar sanitasi yang layak adalah Bali, DI Yogyakarta, dan Kepulauan Riau. Berdasarkan dengan amanat Undang-Undang Nomor.23 tahun 2014 tugas pemerintah

daerah dalam pengaturan, pengawasan, pembinaan, dan pengembangan bagian sanitasi adalah sebagai regulator dan fasilitator.

Sanitasi menurut Richard Sihite (2004) adalah usaha kesehatan yang berfokus kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia, sedangkan menurut World Health Organization (WHO), sanitasi merupakan kegiatan pengendalian lingkungan manusia yang merugikan bagi kesehatan, daya tahan tubuh, maupun perkembangan fisik manusia. Sanitasi adalah perilaku membiasakan hidup bersih dan untuk menjauhkan manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan yang berbahaya, yang mana kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan manusia itu sendiri, menurut WHO pula masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan Indonesia jarang memiliki akses sanitasi yang baik dan layak.

Program Sanitasi Berbasis Masyarakat memiliki beberapa jenis diantaranya sebagai berikut :

1. SANIMAS Reguler, merupakan program sanitasi berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan didanai oleh Anggaran Pendapatan Biaya Negara (APBN).
2. SANIMAS USRI (Urban Sanitation and Rural Infrastruktur), merupakan program Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai dukungan untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang didanai oleh pinjaman *Asian Development Bank*.
3. SANIMAS DAK, merupakan program Sanitasi Berbasis Masyarakat yang dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan didanai oleh Dana Alokasi Khusus Nasional.



4. SANIMAS IDB, adalah program Sanitasi Berbasis Masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Umum dan didanai oleh pinjaman dari *Islamic Development Bank*.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 965/MENKES/SK/XI/1992, diperlukan adanya perbaikan sanitasi lingkungan sebagai solusi untuk mewujudkan kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan karena masalah sanitasi bukan hanya merusak fisik lingkungan tetapi juga merusak mental sosial masyarakat, sanitasi lingkungan dilakukan untuk menghindari timbulnya penyakit.

Mengacu pada pengertian sanitasi di atas, berikut merupakan indikator sarana sanitasi ( Mundiatur dan Daryanto, 2017 :119 ), meliputi :

1. Sarana air bersih
2. Jamban
3. Sarana Pembuangan Air Limbah
4. Sarana Pembuangan Sampah

Berikut merupakan contoh dari tindakan sanitasi lingkungan, yaitu:

1. Membuat dan mengatur saluran pembuangan air hujan di pinggir jalan.
2. Membuat dan mengatur saluran pembuangan air limbah rumah tangga seperti limbah dapur dan limbah kamar mandi.
3. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
4. Menyediakan fasilitas toilet umum yang bersih.
5. Pengelolaan limbah dan sampah yang baik, dan teratur.

Dalam penyelenggaraan program sanitasi masih sering ditemukan hambatan-hambatan yang mengganggu proses pelaksanaan program tersebut, berikut merupakan permasalahan sanitasi secara umum, yaitu:

1. Perencanaan sanitasi masih relatif parsial dan sektoral kurang terintegrasi antar sub sektor air limbah, persampahan dan drainase.
2. Kinerja dan koordinasi antar pihak yang bersangkutan dengan pengendalian masalah sanitasi masih belum terpadu.
3. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar, itu karena tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tentang sanitasi yang berlaku masih rendah.
4. Investasi dari pihak swasta masih terbatas, karena pengendalian sanitasi tersebut dinilai masih kurang layak.
5. Keterbatasan anggaran untuk pengendalian sanitasi masih belum menjadi prioritas.
6. Partisipasi pihak swasta masih rendah karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait.

Dalam rangka menangani permasalahan sanitasi lingkungan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah memiliki program, setiap daerah diwajibkan mengikuti program yang disebut PPSP (Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sanitasi di daerah tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak tahun 2015 menyelenggarakan suatu program yakni Program Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh dan berpenghasilan rendah, SANIMAS menempatkan masyarakat sebagai pelaku pengambil

keputusan dan penanggung jawab kegiatan mulai dari identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan melakukan pengawasan terhadap program sanitasi tersebut, fokus pelaksanaan program ini adalah penanganan air limbah rumah tangga dimana masyarakat memilih sendiri sarana dan prasarana air limbah yang sesuai.

Menurut Sri Hartoyo (2017) dalam bukunya “Petunjuk Teknis SANIMAS-*IDB*”, yang dimaksud dari program SANIMAS adalah :

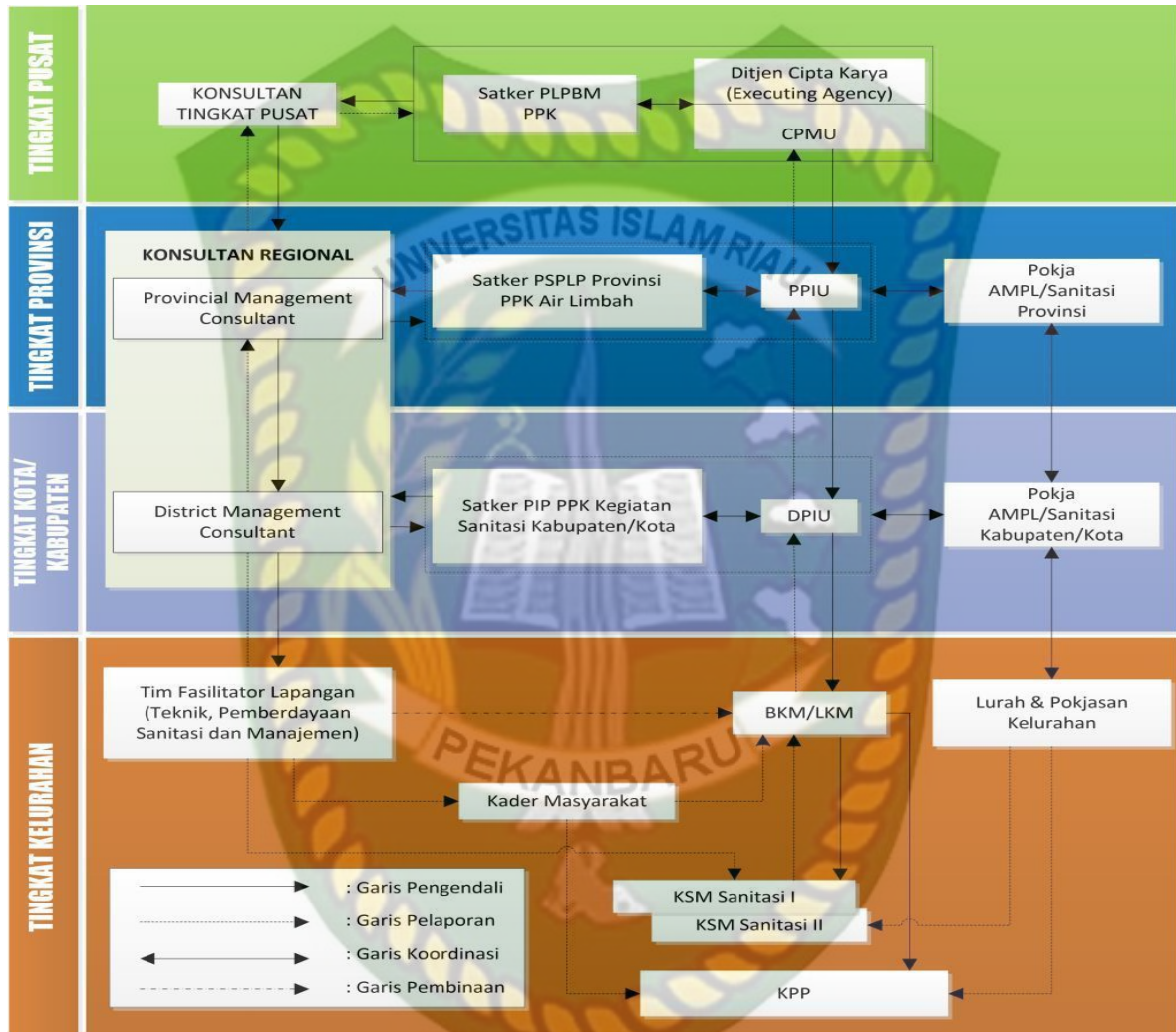
1. Untuk meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat
2. Untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan kebersihan lingkungan masyarakat
3. Menjaga kualitas air tanah dari pencemaran bakteri dan mengurangi beban pencemaran badan air seperti danau, dan sungai.
4. Berikut merupakan tujuan SANIMAS (Sri Hartoyo, 2017), yaitu :
5. Untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sanitasi di daerahnya
6. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi dan melakukan pola bersih dan sehat.
7. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat pada proses perencanaan dan pembangunan sanitasi.
8. Untuk membina organisasi yang ada dalam masyarakat.
9. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana penyehatan lingkungan kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan.
10. Untuk membina masyarakat dalam mengelola sarana dan prasarana penyehatan lingkungan yang ada di permukiman sanitasi.

Selanjutnya, Sasaran program SANIMAS ini, meliputi (Sri Hartoyo, 2017) :

- a. Pemerintah Kabupaten/kota

- b. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di permukiman yang padat penduduk.

Gambar 1.1 Organisasi Pelaksana Program SANIMAS



Sumber : Petunjuk teknis SANIMAS IDB tahun 2017.

SANIMAS atau Sanitasi Berbasis Masyarakat menurut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-4 /PB/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman *Islamic Development Bank* Nomor-IND 167 untuk *Community Based Sanitation Program* (SANIMAS) adalah program untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan



dan semi perkotaan yang banyak masyarakat miskin, menggunakan pinjaman dana dari *Islamic Development Bank* sehingga program ini selanjutnya disingkat *SANIMAS-IDB*.

Program *SANIMAS-IDB* awal mulanya dilaksanakan dalam rangka upaya pencapaian target MDGs (Millennium Development Goals) dan *universal acces* air minum dan sanitasi namun MDGS berakhir sejak tahun 2015 lalu dilanjutkan dengan (*Sustainable Development Goals*) SDGs 2016-2030 yang difasilitasi oleh PBB, memiliki 17 tujuan diantaranya tujuan ke enam adalah air bersih dan sanitasi dengan tujuan utamanya adalah menjamin tersedianya air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. Sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, mengenai proses pencapaian 100% akses air minum, 0% bebas kekumuhan, dan 100% akses sanitasi yang layak pada akhir 2019. Dalam pelaksanaannya program *SANIMAS-IDB* akan menggunakan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang sudah ada sebelumnya sebagai penanggung jawab dan pengawas program tingkat masyarakat, sedangkan penyelenggara program tingkat masyarakat adalah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Penerima dan Pemanfaat (KPP) yang dibentuk melalui rebug warga difasilitasi oleh LKM.

**Tabel I.1 Jumlah Lokasi Pelaksana Program *SANIMAS-IDB* Di Indonesia**

No.	Lokasi Sasaran	Keterangan
1.	Provinsi	13 Provinsi yang terdiri dari: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Barat.
2.	Kabupaten/Kota	52 Kabupaten/Kota yang ada di 13 Provinsi di Indonesia yang telah terpilih dan memiliki Dokumen

		Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
3.	Kelurahan	Memiliki titik lokasi sebanyak 1.800 yang terletak di 52 Kabupaten/Kota dan pernah mendapat bantuan program PNPM Mandiri.

Sumber: Data Olahan Penulis.

**Tabel I.2 Best Practice program SANIMAS-IDB di Indonesia**

Nama Daerah	Best Practice
Kelurahan Pekan Labuhan Kota Medan	Tingginya arus urbanisasi di Kota Medan menyebabkan munculnya daerah-daerah dengan lingkungan yang kumuh akibat kurangnya akses sanitasi, kondisi lingkungannya sebelum masuknya program SANIMAS-IDB dengan sarana IPAL merupakan lingkungan yang buruk, air limbah buangan dapur dan kamar mandi tergenang serta menimbulkan bau tidak sedap yang mengakibatkan munculnya penyakit menular namun sejak adanya program SANIMAS-IDB kondisi lingkungan di Kelurahan Pekan Labuhan menjadi sangat bersih dan menciptakan perilaku hidup sehat di masyarakat dengan tidak buang air sembarangan, bangunan IPAL dimanfaatkan masyarakat sekitar sebagai tempat perkumpulan warga, posyandu, Tempat pendidikan Al-Quran (TPA).
Kelurahan Pamijen, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas	Penyelenggaraan Program SANIMAS-IDB di Kelurahan Pamijen menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat, dengan adanya sarana IPAL menyebabkan mutu lingkungan di Kelurahan Pamijen semakin membaik, perilaku masyarakat di Kelurahan tersebut sudah berubah dari yang sebelumnya masyarakat masih banyak yang membuang air sembarangan seperti dipinggir sungai, saat ini presentase BABS ke Wc pribadi sudah meningkat 99 %, program SANIMAS-IDB tersebut dapat mewujudkan mimpi masyarakat sekitar untuk dapat hidup dilingkungan yang bersih dan layak huni.

Sumber: [detiknews.com](http://detiknews.com)

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki akses sanitasi yang belum memadai yang kemudian menjadi salah satu dari 13 provinsi sasaran program SANIMAS-IDB, Provinsi Riau memiliki 12 kabupaten atau kota yang beberapa diantaranya sudah melaksanakan program percepatan sanitasi seperti di

Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kota Dumai dan Kota Pekanbaru.

Program SANIMAS-*IDB* di Kota Pekanbaru ini digunakan untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal yang sekarang disebut Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), Kota Pekanbaru menjadi salah satu daerah yang mendapatkan bantuan program SANIMAS-*Islamic Development Bank (IDB)* karena memenuhi kriteria lokasi sasaran program SANIMAS, program ini bermula dari tingkat nasional yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedangkan untuk di daerah yang menjadi pelaksana sanitasi lingkungan adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor.95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

**Tabel I.3 Jumlah Wilayah Sasaran Pembangunan IPAL di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2019**

No	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi	Tahun program						Jumlah lokasi
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Bukit Raya	Tangerang Utara	Rt 3 Rw 10	√						1
2	Rumbai Pesisir	Meranti Pandak	Rt 3 Rw 3	√						4
			Rt 2 Rw 5	√						
			Rt 2 Rw 2				√			
			Rt 2 Rw 2				√			
		Lembah Damai	Rt 4 Rw 3		√					4
			Rt 4 Rw 6				√			
Rt 3					√					

			Rw 5							
			Rt 2 Rw 8			√				
		Limbangan	Rt 4 Rw 8				√			1
		Lembah Sari	Rt 1 Rw 1						√	2
			Rt 1 Rw 11					√		
3	Sail	Cinta Raja	Rt 2 Rw 5		√					3
			Rt 5 Rw 1				√			
		Sukamulya	Rt 2 Rw 7		√					
4	Senapelan	Padang Bulan	Rt 3 Rw 3		√					1
5	Tampian	Delima	Rt 3 Rw 8		√					3
		Tuah Karya	Rt 4 Rw 4		√					
			Rt 4 Rw 1		√					
6	Tenayan Raya	Kulim	Rt 1 Rw 8		√					3
		Sail	Rt 5 Rw 29		√					
		Sialang Rampai	Rt 2 Rw 6			√				
7	Payung Sekaki	Labuh Baru Timur	Rt 2 Rw 10				√			1
8	Rumbai	Sri Meranti	Rt 4 Rw 4				√			4
			Rt 3 Rw 6				√			
			Rt 2 Rw 20				√			
			Rt 4 Rw 16			√				
9	Pekanbaru Kota	Sukaramai	Rt 4 Rw 2				√			1

Sumber: Profil Program SANIMAS-IDB Kota Pekanbaru yang telah di Modifikasi Penulis 2020.

Berdasarkan Tabel I.3 diatas, jumlah wilayah sasaran program SANIMAS-IDB di Kota Pekanbaru tersebar di sembilan Kecamatan dengan jumlah keseluruhan 28 unit



yang tersebar di Kecamatan Bukit Raya tepatnya di Kelurahan Tangkerang Utara sebanyak 1 unit, Kecamatan Rumbai Pesisir yang tersebar di Kelurahan Meranti Pandak, Lembah Damai, Limbungan dan Lembah Sari sebanyak 11 unit, lalu Kecamatan Sail tepatnya di Kelurahan Cinta Raja dan Sukamulya sebanyak 3 unit, Kecamatan Senapelan yang terletak di Kelurahan Padang Bulan terdapat 1 unit, Kecamatan Tampan tersebar di Kelurahan Delima dan Tuah Karya sebanyak 3 unit, Kecamatan Tenayan Raya tersebar di 3 Kelurahan yakni Kelurahan Kulim, Sail, dan Sialang Rampai dengan jumlah 3 unit, Kecamatan Payung Sekaki tepatnya di Kelurahan Labuh Baru Timur sebanyak 1 unit, Kecamatan Rumbai tepatnya di Kelurahan Sri Meranti sebanyak 4 unit, dan Kecamatan Pekanbaru Kota tepatnya di Kelurahan Sukaramai 1 unit.

Berikut merupakan sumber pendanaan program SANIMAS- *IDB* :

1. Dari dana pinjaman *IDB* yang digunakan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan konstruksi, biaya untuk konsultan dan untuk workshop
2. Dana dari APBN yang digunakan untuk menggaji Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
3. Dana dari APBD untuk membantu jalannya program SANIMAS-*IDB*
4. Dana swadaya masyarakat

Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-4/ PB/ 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman *Islamic Development Bank* Nomor IND-167 Untuk *Community Based Sanitation Program* (SANIMAS) Untuk pencairan dana melalui Menteri Keuangan yang kemudian membuka Rekening Khusus (REKSUS) pada Bank Indonesia atau bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dana awal reksus adalah dana

awal yang ditempatkan di dalam Reksus oleh pemberi PHLN melalui permintaan Bendahara Umum Negara untuk kebutuhan selama periode yang ditentukan.

Sedangkan tujuan dari penggunaan dana bantuan adalah untuk pembangunan baru infrastruktur sanitasi dengan pilihan sebagai berikut :

1. **Pembangunan IPAL Komunal dengan menggunakan sistem perpipaan**
2. Kombinasi IPAL Komunal dengan sistem perpipaan dan MCK

Besaran alokasi dana bantuan yang dapat digunakan untuk pembangunan sarana SANIMAS-IDB untuk 1 lokasi maksimal Rp 425.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) maksimal 10% untuk komponen penunjang seperti air bersih, persampahan dan drainase, berikut merupakan rincian penggunaan dana bantuan, meliputi:

- a. Minimal 60% untuk biaya konstruksi sarana fisik
- b. Maksimal 35% yang digunakan untuk biaya upah
- c. Maksimal 5% yang dapat digunakan untuk operasional pelaksanaan fisik yang sedang berlangsung.

Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALDT) yang di bangun untuk pengelolaan limbah cair dan MCK yang digunakan secara Domestik dan Komunal (digunakan oleh sekelompok rumah tangga) untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pembangunan sarana SPALDT yang sering disebut IPAL Komunal ini menjadi pilihan untuk menangani pencemaran air limbah yang merusak lingkungan dan makhluk hidup melalui sistem pengelolaan (hajar et al, 2017) Pembangunan IPAL ini dapat menjadi solusi penanganan permasalahan sanitasi yang ada pada suatu wilayah, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik, IPAL Komunal ini mampu melayani 50 sampai 20 ribu jiwa.

**Tabel I.4 Lokasi dan Anggaran Dana dari Bantuan IDB untuk Program****SANIMAS di Kota Pekanbaru Selama 3 Tahun Terakhir (2017-2019)**

No.	Kecamatan	Anggaran/ Unit (Rp)	Jumlah (Unit)	Total (Rp)
1.	Rumbai Pesisir	425.000.000	7	2.975.000.000
2.	Sail	425.000.000	1	425.000.000
3.	Payung Sekaki	425.000.000	1	425.000.000
4.	Rumbai	425.000.000	3	1.275.000.000
5.	Pekanbaru Kota	425.000.000	1	425.000.000
<b>Jumlah</b>			<b>13</b>	<b>5.525.000.000</b>

Sumber: Data Olahan Penulis 2020

Dari Tabel diatas terdapat jumlah lokasi sasaran program SANIMAS-IDB selama 3 tahun terakhir (2017-2019) sebanyak 13 titik yang tersebar di 5 Kecamatan. Dari 5 Kecamatan penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pelaksanaan program SANIMAS-IDB di Kecamatan Rumbai Pesisir karena sarana dan prasarana sanitasi yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir sangat kurang memadai dapat dilihat dari :

1. Kelurahan Lembah Sari merupakan Kawasan padat penduduk yang Sebagian warganya belum memiliki sarana sanitasi pengelolaan air limbah yang memadai seperti rumah-rumah yang belum memiliki jamban sehingga masih banyak masyarakat yang mandi di masjid bahkan ada yang buang air sembarangan kesungai disekitar rumah mereka.
2. Banyak rumah masyarakat yang memiliki drainase yang kecil sehingga menyebabkan genangan air limbah rumah tangga.
3. Kepemilikan septic tank masing-masing rumah belum sesuai standar dan tidak pernah dikuras sehingga menyebabkan kebocoran dan mencemari tanah.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALDT) di bangun menggunakan jaringan perpipaan dengan prinsip anaerobic filter yang merupakan



pengolahan air limbah dengan proses biofilm dan biofilter. Di kecamatan Rumbai Pesisir terdapat 11 bangunan IPAL yang tersebar di 4 kelurahan, yakni sebagai berikut:

1. Kelurahan Meranti Pandak sebanyak 4 unit
2. Kelurahan Lembah Damai sebanyak 4 unit
3. Kelurahan Limbungan sebanyak 1 unit
4. Kelurahan Lembah Sari sebanyak 2 unit

Bangunan IPAL Komunal yang ada di jalan Pramuka Rt 01 Rw 01 Kelurahan Lembah Sari mulai dibangun pada tahun 2018 dan diresmikan tahun 2019 dengan jumlah biaya Rp. 425.000.000,- per unit dimana satu unitnya dapat mengelola limbah dengan kapasitas sambungan sampai 50 SR (Sambungan Rumah).

**Gambar I.2 RAB Program SANIMAS-IDB Tahun 2019**

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA PROGRAM SANIMAS ISDB TAHUN 2019		
Program	: SANIMAS-IsDB TAHUN 2019	
Pekerjaan	: SPALD-T	
Lokasi	: RT 01 RW 01	
Kelurahan	: LEMBAH SARI	
Kecamatan	: RUMBAI PESISIR	
Kota	: PEKANBARU	
Provinsi	: RIAU	
NO	URAIAN PEKERJAAN	BIAYA
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 4.256.200,00
II	PEKERJAAN IPAL KOMUNAL	Rp 195.483.168,32
III	PEK. PIPA UTAMA Ø 6"	Rp 61.216.157,12
IV	PEK. PIPA LATERAL PVCØ 4"	Rp 65.367.871,99
V	PEK. BAK KONTROL/GREASE TRAP	Rp 36.898.363,90
VI	PEK. MANHOLE	Rp 20.044.617,75
VII	PEKERJAAN ATAP IPAL	Rp 20.502.950,62
VIII	BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN	Rp 21.250.000,00
<b>TOTAL BIAYA KONSTRUKSI</b>		<b>Rp 425.019.329,69</b>
<b>DISULATKAN</b>		<b>Rp 425.000.000,00</b>
Terbilang :	Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah	

Disetujui Oleh :  
TAMK Sanimas IsDB  
Kota Pekanbaru

*Yuli Sugianto, ST*  
YULI SUGIANTO, ST  
TAMK

Diverifikasi Oleh :  
Tenaga Fasilitator Lapangan  
Kota Pekanbaru

*Khalika Jaspi, ST*  
KHALIKA JASPI, ST  
TFL Teknik

*Andi Meirizal, S.I.KOM*  
ANDI MEIRIZAL, S.I.KOM  
TFL Pemberdayaan

*Cut Munawwarah, S.Pd*  
CUT MUNAWWARAH, S.Pd  
TFL Manajemen

Pekanbaru, 2019

Dibuat Oleh

LKM

*Yuli Sugianto, ST*  
YULI SUGIANTO, ST  
KORDINATOR LKM

*Yuli Sugianto, ST*  
YULI SUGIANTO, ST  
KORDEKSI

Sumber : Buku RKM Program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari 2019

**Tabel I.5 Calon Pemanfaat Program SANIMAS di RT 01 RW 01 Kelurahan**

**Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2019**



Jumlah Sambungan Rumah	65	Sambungan Rumah
Jumlah Kartu Keluarga	65	Kartu Keluarga
Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah	45	Kartu Keluarga
Jumlah Penduduk	237	Jiwa
Jumlah Penduduk laki-laki	122	Jiwa
Jumlah Penduduk Perempuan	115	Jiwa

Sumber: *Sanimas IDB Tahun 2018*

Berdasarkan Tabel I.2 Calon Pemanfaat Program SANIMAS-IDB di RT 01 RW 01 Kelurahan Lembah Sari diketahui ada 65 Jumlah SR (Sambungan Rumah), 65 Jumlah KK (Kartu Keluarga), 45 Jumlah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), Jumlah Penduduk 237 Jiwa yang terbagi menjadi 122 Jiwa Jumlah Penduduk Laki-laki dan 115 Jiwa Jumlah Penduduk Perempuan

Namun tidak dapat dipungkiri kondisi sarana sanitasi di Kelurahan Lembah Sari terutama di Rt 01 Rw 01 masih tergolong kurang baik, permasalahan sanitasi tersebut disebabkan karena kurangnya sarana prasarana sanitasi yang layak serta masih banyak masyarakat yang buang air sembarangan dan menyalurkan air limbah kamar mandi dan air limbah cucian piring langsung ke drainase tanpa melalui tahap pengelolaan, oleh karena itu saluran drainase dipenuhi dengan tumpukan sampah dan limbah rumah tangga yang kemudian menciptakan lingkungan kumuh serta menyebabkan berbagai penyakit menular seperti DBD, Diare, Typhus, Malaria, ISPA maupun Penyakit Kulit.

**Tabel I.6 Kondisi Kesehatan Masyarakat Rt 01 Rw 01 Kelurahan Lembah****Sari**

No	Nama Penyakit	Jumlah Penderita (Jiwa)/ Tahun Kejadian				Jumlah
		2014	2015	2016	2017	
1	Ispa	5	4	6	4	19
2	Diare	6	4	5	6	21
3	Demam Berdarah	8	-	2	4	14
4	Tipes	2	10	1	7	20
5	Leptospirosis	-	-	-	-	-
6	Chikungunya	-	-	-	-	-

Sumber: Kelompok Kerja Sanitasi Kelurahan Lembah Sari 2018

Berdasarkan Tabel I.3 dapat disimpulkan bahwa Jumlah penderita dari tahun 2014 sampai 2017 untuk penyakit Ispa sebanyak 19 kasus, Diare 21 kasus, Demam Berdarah 14 kasus, Tipes 20 kasus dan untuk penyakit Leptospirosis dan Chikungunya tidak ada kasus sepanjang 2014 sampai 2017.

Berikut merupakan beberapa fenomena mengenai Implementasi program Sanitasi Berbasis Masyarakat-*Islamic Development Bank* di Kota Pekanbaru (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir), sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengenai Program SANIMAS-*IDB* kepada pelaksana tingkat Kelurahan dan masyarakat pemanfaat program di Kelurahan Lembah Sari yang menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai program SANIMAS-*IDB* sehingga pelaksanaan program tersebut belum berjalan optimal.

2. Belum maksimalnya koordinasi dan kerjasama antara pelaksana di tingkat Kelurahan yaitu KPP dengan Masyarakat di lokasi program Sanimas sehingga bangunan IPAL Komunal yang sudah ada pemanfaatannya belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul “**Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat-Islamic Development Bank di Kota Pekanbaru (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)**”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat-Islamic Development Bank Kota Pekanbaru ( Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat-Islamic Development Bank kota Pekanbaru (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat-Islamic Development Bank (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi pembaca mengenai Implementasi Sanitasi Berbasis Masyarakat-*Islamic Development Bank* di Kota Pekanbaru (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir).

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang berminat membahas masalah yang sama lebih lanjut pada masa yang akan datang yaitu mengenai Implementasi Sanitasi Berbasis Masyarakat-*Islamic Development Bank* di Kota Pekanbaru (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir).

c. Kegunaan Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pikiran bagi penulis dan pihak-pihak lainnya yang ingin menyelesaikan studi tentang program Sanitasi Berbasis Masyarakat- *Islamic Development Bank* yang diperoleh semasa kuliah.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini sangat diperlukan landasan teori, konsep serta aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan fenomena yang diteliti agar mudah menjelaskan maksud dari penelitian ini, yang dapat ditemukan di dalam buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi dan lainnya yang dapat diperoleh secara tertulis maupun melalui media elektronik. Adapun yang berkaitan dengan fenomena dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Konsep Pemerintahan

Dalam melaksanakan pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian uraian tentang definisi pemerintahan, secara epistemologi kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah, Pemerintah menurut Finer dalam Sumaryadi (2010:17), mengelompokkan pemerintah kedalam beberapa definisi, yaitu:

Pertama, pemerintah mengacu kepada proses pemerintahan berupa kekuasaan oleh yang berwenang. kedua, pemerintah sering disebut orang-orang yang memiliki kedudukan otoritas di dalam suatu masyarakat ketiga, sistem pemerintahan dan metode dalam masyarakat yaitu pengelolaan dinas pemerintah dan hubungannya dengan yang diperintah.

Sedangkan menurut Sumaryadi (2010:18), mengelompokkan pemerintah sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah suatu otoritas untuk memerintah dari lembaga politik

2. Pejabat yang merupakan badan pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan menjalankannya
3. Suatu kekuasaan yang memiliki wewenang untuk mengatur dan memerintah masyarakat
4. Lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan seperti undang-undang untuk mengatasi masalah pemerintahan dengan kekuasaan yang sah.

Secara etimologi menurut syafiie (2007:4) pengertian pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah yang berarti memiliki makna melakukan pekerjaan menyuruh antara dua pihak yakni yang memiliki wewenang yaitu pemerintah dan yang memiliki kepatuhan yakni yang diperintah.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang artinya adalah suatu badan atau lembaga yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk memerintah.
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, yang berarti suatu perbuatan, cara atau urusan dari badan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah tersebut.

Kemudian dikuatkan menurut teori Woodrow Wilson dalam Syafiie(2013:10) yang menjelaskan bahwa pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi yang memiliki kekuatan bersenjata, tetapi beberapa orang yang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi yang berkaitan dengan hal-hal kemasyarakatan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.

Menurut Sri Maulidiah (2014:1), Pemerintahan adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberikan legitimasi atau keabsahan dalam bentuk wewenang oleh rakyat kepada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan negara sebagai faktor pendukung dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memiliki empat fungsi utama yakni; fungsi pelayanan pemerintahan, fungsi pelayanan pembangunan dan fungsi pelayanan kemasyarakatan dan pelayanan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Bastian Indra (2006), Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah memiliki kewenangan menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, kepemimpinan dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah, maupun koordinasi antara rakyat dengan pemerintahnya dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Lebih lanjut menurut Syafiie (2010:14) Pemerintahan adalah sekelompok orang yang melakukan sesuatu tindakan koordinasi atau tidak melakukan suatu tindakan koordinasi yang dilaksanakan secara baik dan benar dalam hubungan antara pemerintah itu sendiri dengan masyarakat maupun dengan unit atau bagian dalam suatu pemerintahan itu sendiri.

Sedangkan menurut Ndraha (2011: 5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang memiliki tujuan untuk memenuhi dan melindungi tuntutan dan kebutuhan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil, tuntutan yang diperintah berdasarkan posisinya seperti sedang sebagai pelanggan atau customer yang tidak berdaya, dan sebagainya.

Jadi, berdasarkan definisi tentang pemerintahan yang telah dijelaskan diatas, maka dimuatkan dan disimpulkan menurut Kitab Suci Al-Qur'an dalam Syafiie (2013; 12) yang menjelaskan bahwa pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang hal-hal yang buruk, dan itulah orang-orang yang beruntung.

## 2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Rosenthal (dalam Syafiie 2010:23) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur pemerintahan umum, sedangkan menurut Brasz (dalam Syafiie 2010:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu badan pemerintahan itu dijalankan secara internal maupun terhadap masyarakat.

Menurut Ndraha (2011:17) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melindungi, memenuhi kebutuhan, dan memenuhi tuntutan setiap orang terhadap jasa public maupun jasa civil dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sehingga dapat bermanfaat saat dibutuhkan oleh pihak yang berkaitan.

Menurut Syafiie (2011:23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menjalankan urusan eksekutif, legislatif, kepemimpinan dan koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah maupun dengan rakyatnya secara baik dan benar dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Wasistiono (2015:61) mendeskripsikan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisasi yang tertinggi dalam suatu negara yaitu pemerintahan dalam menjalankan hak dan kewajibannya kepada negara berhubungan langsung dengan masyarakatnya.



Menurut A. Van Braam (dalam Ermaya 2011:80) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang sebagian besar masih mewujudkan diri dalam bentuk suatu himpunan atau perkumpulan dari suatu jenis studi yang mempelajari tentang gejala yang dilakukan dalam suatu pemerintahan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu terapan yang mempelajari tentang bagaimana melaksanakan koordinasi mengenai urusan eksekutif antara lembaga pemerintahan yang berkaitan maupun antara yang memberi perintah dengan yang diperintah secara baik dan benar dengan memberikan kepuasan terhadap pemenuhan tuntutan terhadap pelayanan kepada masyarakat di dalam penyelenggaraan suatu organisasi (Syafie, 2011:10)

### **3. Konsep Kebijakan Publik**

James E Anderson (dalam Islamy, 2009:17) menjelaskan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* ”, yang berarti bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pihak atau sekelompok orang untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Konsep Kebijakan oleh Anderson tersebut menurut Winarno (2014:18) dianggap lebih tepat karena dijelaskan dalam konsep tersebut mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, jadi bukan apa yang diusulkan, konsep ini juga berisi perbedaan antara kebijakan dengan kepuasan sebagai pilihan dari berbagai alternatif yang dimiliki.

Anderson dalam Agustino (2017:17) menjelaskan bahwa kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Budi Winarno (2007: 15) istilah kebijakan digunakan secara umum seperti pada kebijakan di luar negeri indonesia, dan kebijakan ekonomi di jepang maupun digunakan untuk suatu hal yang lebih khusus, sedangkan menurut Richard Rose yang dikutip pada Budi Winarno (2007: 17) juga menyebutkan suatu kebijakan seharusnya dapat dimengerti dan dipahami sebagai suatu kegiatan yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya serta memiliki konsekuensi terhadap keputusan yang diambil dalam suatu kebijakan.

George C. Edwards 3 dan Ira Sharkansky (dalam Islamy,2003:18) menjelaskan bahwa kebijakan publik diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan dari program yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Budi Winarno, 2002:17) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu hipotesis yang didalamnya terdapat kondisi awal dan akibat-akibat yang dapat di prediksi, Pressman dan Wildavsky ( dalam Winarno 2014: 17) juga menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah suatu hipotesis yang berisi kejadian awal dan akibat yang bisa diprediksi, kebijakan publik wajib berbeda dengan kebijakan yang lainnya seperti kebijakan swasta karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bukan dari lingkungan pemerintahan.

Nugroho (2008: 58) menyebutkan ada dua karakteristik dari suatu kebijakan publik, yaitu : (1) kebijakan publik mencakup hal-hal untuk mencapai suatu tujuan nasional, (2) kebijakan publik merupakan hal-hal yang mudah diukur karena memiliki ukuran mencapai tujuan yang telah ditempuh.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja oleh

seseorang, atau pemerintah yang memiliki unsur keputusan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan kebijakan publik dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan mencapai tujuan tertentu.

#### **4. Konsep Implementasi Kebijakan**

Menurut Winarno (2007:144) implementasi dalam definisi yang luas merupakan suatu tahapan yang segera dilaksanakan dari sebuah proses kebijakan setelah adanya penetapan peraturan undang-undang, di dalam undang-undang pelaksanaan implementasi terdiri dari berbagai aktor, prosedur dan organisasi yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2012:149-150) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan sebagai suatu langkah atau tindakan berupa sesuatu untuk merubah keputusan menjadi tindakan operasional agar terjadi suatu perubahan yang dilakukan oleh individu, pejabat maupun pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya .

Menurut Syauckani dkk (2004:295) implementasi adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menyampaikan kebijakan kepada masyarakat agar kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan, kegiatan yang dimaksud adalah mempersiapkan peraturan, mempersiapkan sumber daya, lalu menghantarkan kebijakan tersebut kepada masyarakat.

Surmayadi (2005:79) mengemukakan tiga unsur yang terdapat dalam proses implementasi , yakni : (1) memiliki kebijakan atau program yang akan dijalankan, (2) sasaran program yaitu masyarakat mendapatkan manfaatnya baik suatu peningkatan maupun perubahan, (3) organisasi maupun perorangan sebagai pihak pelaksana

memiliki tanggung jawab sebagai pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses implementasi tersebut.

Menurut Hasibuan (2006:72) menjelaskan bahwa program adalah suatu rencana yang bersifat konkret dan jelas karena memiliki prosedur, sasaran yang tepat, kebijaksanaan, anggaran yang baik, dan waktu penyelenggaraannya yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

- a) Jones (dalam Arif Rohman, 2009:101-102) berpendapat bahwa implementasi program merupakan unsur yang terdapat pada suatu kebijakan sebagai upaya pihak yang memiliki wewenang untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, lebih lanjut Jones menjelaskan bahwa di dalam pelaksanaan program terdapat beberapa aspek, yakni :
  - b) Tujuan yang akan dicapai
  - c) Kegiatan yang akan dipilih dalam pencapaian tujuan program tersebut
  - d) Prosedur atau aturan yang harus dijalankan
  - e) Mempersiapkan biaya yang akan digunakan
  - f) Menyusun strategi pelaksanaannya

## **5. Teori Implementasi Kebijakan**

Menurut Charles O. Jones (dalam Siti Erna Latifa Suryana, 2009: 28) menjelaskan bahwa ada tiga pilar dalam menjalankan program, yakni:

### **1. Pengorganisasian**

Dimana dalam menjalankan suatu program memiliki struktur organisasi atau pelaksana yang jelas, berasal dari orang-orang yang mempunyai kompetensi dan berkualitas.



## 2. Interpretasi

Dalam proses pencapaian tujuan, para pelaksana atau pihak yang terkait harus mampu menjalankan program tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

## 3. Penerapan

Memerlukan perencanaan prosedur kerja yang jelas agar program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan jadwal.

Menurut George C. Edwards (2004) menjelaskan bahwa implementasi program atau kebijakan memiliki empat variabel, sebagai berikut :

### 1. Komunikasi

Komunikasi berkaitan dengan bagaimana suatu program dikomunikasikan kepada organisasi, komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana untuk mengetahui apa yang akan dilakukan, keberhasilan komunikasi ditentukan oleh tiga indikator yaitu : penyaluran komunikasi, konsistensi komunikasi dan kejelasan komunikasi.

### 2. Ketersediaan Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor penting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan agar berjalan secara efektif dan efisien, seperti sumber daya manusia dan sumber daya finansial.

### 3. Sikap Pelaksana atau disposisi

Sikap pelaksana atau disposisi sering disebut juga sebagai watak dari implementator seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis, apabila implementator memiliki watak yang baik maka kebijakan atau program tersebut akan berjalan baik pula.

#### 4. Struktur Birokrasi

Salah satu unsur yang terpenting dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan dalam suatu organisasi adalah adanya SOP atau *standard operating procedures* yang akan dijadikan petunjuk bagi setiap implementor dalam pelaksanaan program tersebut.

Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Suharno (2013:176-177) berpendapat bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja proses implementasi, yaitu :

##### 1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Untuk mengukur keberhasilan suatu program maka harus memiliki ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas, sedangkan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan menggunakan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan.

##### 2. Sumber daya

Keberhasilan dalam pelaksanaan program ditentukan oleh kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia yang berkualitas dan sumber daya waktu bagaimana bisa memanfaatkan waktu dengan baik.

##### 3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada organisasi pelaksana yang meliputi organisasi formal maupun informal yang terlibat dalam proses implementasi program tersebut hal ini merupakan unsur yang sangat penting karena kinerja implementasi akan dipengaruhi ciri-ciri yang tepat dengan agen pelaksananya.

##### 4. Sikap para pelaksana

Program yang dilaksanakan bukanlah hasil dari kebijakan warga setempat yang sudah mengerti permasalahan, kebutuhan, keinginan yang mereka ingin selesaikan.

## 5. Komunikasi antar organisasi

Syarat utama dalam keberhasilan implementasi program adalah komunikasi, semakin baik koordinasi antara para pihak yang terkait maka akan hasilnya akan baik pula.

## 6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Dalam implementasi program perlu memperhatikan kondisi lingkungan eksternal yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan politik agar dapat menilai bagaimana lingkungan eksternal tersebut membantu keberhasilan.

Sedangkan menurut David L. Weimer dan Aidan R. Vining (2007 : 396) menjelaskan bahwa ada tiga variabel dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan, sebagai berikut :

### 1. Logika dari sebuah kebijakan

Hal ini dilakukan agar suatu kebijakan yang dilaksanakan bersifat rasional dan memiliki dukungan teoritis

### 2. Lingkungan tempat kebijakan

Lingkungan tempat pengoperasian program ini seperti lingkungan sosial, politik, ekonomi, fisik atau geografis sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

### 3. Kemampuan implementor

Keberhasilan implementasi suatu program ditentukan oleh kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh implementor atau pihak pelaksana.

Teori Merilee S. Grindle (1980) yang dijelaskan dalam (Wibawa, 2005: 36) bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu isi kebijakan dan

lingkungan implementasi, sedangkan variabel isi kebijakan menurut Grindle terbagi menjadi:

- a. Kepentingan kelompok target ada di dalam isi kebijakan
- b. Manfaat positif yang diterima oleh kelompok sasaran
- c. Besarnya perubahan yang terjadi dari adanya suatu kebijakan
- d. Letak pengambilan keputusan yang akan di laksanakan
- e. Para pelaksana atau implementor program sudah dijelaskan dengan rinci
- f. Didukung oleh sumber daya agar kebijakan berjalan dengan baik

Sedangkan variabel lingkungan implementasi program atau kebijakan memiliki tiga indikator, yaitu :

- a) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para pelaksana program tersebut
- b) Karakteristik lembaga yang berwenang
- c) Responsivitas dan daya tanggap dari sasaran

#### **6. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat- *Islamic Development Bank***

Menurut Dinas Pekerjaan Umum (dalam buku pedoman SANIMAS, 2008), SANIMAS adalah program nasional yang berfokus pada pengelolaan pembuangan air limbah rumah tangga, yang disusun untuk menciptakan budaya dalam masyarakat di area kawasan kumuh, padat penduduk, dan memiliki ekonomi rendah yang berada di kota-kota besar, pemilihan sistem program ini sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan pilihan mereka sendiri, jadi peran lembaga pemerintah hanya sebagai fasilitator, dengan kata lain kewenangan tertinggi dalam pengambilan keputusan tentang penyerahan lingkungan berada pada masyarakat, berikut merupakan peran masyarakat mulai dari :



- a) Mengklasifikasikan kebutuhan sanitasi masyarakat
- b) Melakukan perencanaan yang sesuai
- c) Memilih teknologi yang akan digunakan ( perencanaan teknis)
- d) Melakukan pembangunan
- e) Melakukan pengelolaan operasional program
- f) Melakukan pengawasan terhadap jalannya program tersebut

Sanitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu usaha untuk menciptakan dan membina suatu kondisi yang baik untuk kesehatan lingkungan masyarakat, dengan kata lain sanitasi adalah sikap yang disengaja dalam membudayakan gaya hidup bersih agar manusia tidak bersentuhan secara langsung dengan kotoran dan zat berbahaya yang lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan manusia.

Program Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum mengenai perbaikan akses sanitasi yang ada di lingkungan padat penduduk, kumuh dan memiliki banyak masyarakat miskin di daerah perkotaan yang mendapat program dari PNPM Mandiri (Hartoyo, 2017).

Program Sanitasi Berbasis Masyarakat menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat, dimana konsep ini menjadikan masyarakat sebagai pihak pertama yang ada di dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal dari program tersebut agar fasilitas yang dibangun memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitarnya (Zudika, 2018).

*Islamic Development Bank* atau Bank Pembangunan Islam merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1975 oleh Organisasi Konferensi Islam

yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di 57 Negara anggotanya salah satunya Indonesia dengan prinsip syariah.

Mekanisme penyelenggaraan Program SANIMAS-*IDB* ini merupakan pendekatan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatannya. Berikut merupakan keterlibatan masyarakat dalam setiap proses jalannya program tersebut, antara lain (Nadya Sara Safira,2018) :

1. Tahap penyiapan masyarakat
  - a) Promosi mengenai program SANIMAS-*IDB*
  - b) Melakukan sosialisasi tahap pertama yaitu pada tingkat kelurahan
  - c) Melaksanakan rembug kelurahan tahap pertama
  - d) Menghasilkan :
    - 1) Pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan program tersebut
    - 2) Penandatanganan surat kesiapan masyarakat
    - 3) Membentuk kelompok kerja tingkat kelurahan
2. Tahap perencanaan
  - a) Promosi mengenai program SANIMAS-*IDB*
  - b) Melaksanaan pemetaan sanitasi di kelurahan
  - c) Menyusun rencana kerja perbaikan sanitasi
  - d) Melakukan rembug tahap kedua
  - e) Melakukan rembug Rt dan Rw tahap kedua
  - f) Menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM), Rencana Teknis, serta RAB
  - g) Penyelesaian dokumen Rencana Kerja Masyarakat
  - h) Menghasilkan Rencana Kerja Masyarakat dan Rencana Aksi Perbaikan Sanitasi

### 3. Tahap pelaksanaan Fisik

- a) Melakukan promosi program *SANIMAS-IDB*
- b) Penandatanganan kontrak kerja (SP3)
- c) Melakukan rebug tingkat Rt dan Rw tahap ketiga
- d) Memulai pelaksanaan kontruksi
- e) Menghasilkan : terbentuknya kelompok pemanfaat dan pemelihara KPP dan terbentuknya bangunan fisik sanitasi

### 4. Tahap serah terima

- a) Promosi program *SANIMAS-IDB*
- b) Melakukan rebug tingkat Rt dan Rw tahap ketiga
- c) Melaksanakan serah terima bangunan fisik sanitasi
- d) Menghasilkan: penerimaan sarana sanitasi oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara yang bertanggung jawab mengelola sarana sanitasi tersebut

### 5. Tahap pelaksanaan dan pemeliharaan

- a) Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan kelanjutan pelayanan dari sarana sanitasi tersebut dan
- b) Menghasilkan : pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi yang sudah dibangun.

## **7. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal**

Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal atau sering disebut IPAL komunal adalah sistem pengelolaan air limbah yang dalam pengoperasiannya dilakukan secara terpusat yang memiliki bangunan untuk memproses air limbah cair domestik seperti limbah dari kamar mandi, limbah cuci piring maupun limbah dari WC yang digunakan

oleh sekelompok masyarakat atau disebut komunal, limbah cair dari masyarakat melalui sistem perpipaan lalu diarahkan ke bangunan bak IPAL agar setelah melalui pemrosesan di dalam bak tersebut sesuai dengan baku mutu lingkungan, air limbah aman dialirkan ke lingkungan masyarakat (Rhomaidi, 2008).

Sistem IPAL komunal ini dilaksanakan untuk mengelola air limbah domestik masyarakat pada kawasan yang tidak dapat dilakukan pengelolaan air limbah tersebut secara pribadi, proses pengelolaan diawali dari setiap MCK yang ada di rumah masyarakat lalu dihubungkan ke saluran pembuangan ke dalam sistem perpipaan yang selanjutnya di arahkan menuju sistem pengelolaan air limbah komunal yang dapat digunakan untuk 10 sampai 100 rumah masyarakat, dari instalasi pengolahan tersebut lalu dibuang ke sumur resapan atau dibuang ke badan air (sungai) (Rhomaidi, 2008)

#### **B. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu**

Sebelum penulis melakukan penelitian mengenai Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Studi Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah) Komunal di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, ada beberapa penelitian yang telah melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul penulis, berikut penulis lampirkan beberapa penelitian terdahulu :

Penelitian : Reka Yuliana. 2019, dengan judul. Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat (Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti), penelitian ini lebih memfokuskan kepada evaluasi kegiatan, lalu melihat dampak kegiatan tersebut terhadap masyarakat dan perubahan kondisi sanitasi lingkungan masyarakat, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan tahun 2017 di



Kelurahan Selatpanjang Selatan sudah terlaksana dengan cukup baik, kegiatan dalam pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sanitasi menghasilkan dampak dan manfaat yang positif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat, suksesnya kegiatan tersebut dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat yang mau berpartisipasi dan menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Penelitian: Shella Febrian Saputri. 2018, dengan judul. Implementasi Kebijakan Pembangunan Ipal Komunal Di Kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, penelitian ini lebih memfokuskan kepada kebijakan pengembangan IPAL Komunal yang termuat di dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan strategi nasional untuk pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pembangunan IPAL Komunal di Kampung Sanan belum merata, karena dari penyusunan rencana jumlah penerima manfaat yakni terdapat 195 rumah namun hanya 58 rumah saja yang terhubung dengan bangunan IPAL tersebut, hal ini tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disusun sebelumnya.

Penelitian: Zudika Dm Manullang. 2014, Evaluasi Dampak Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan), penelitian ini lebih memfokuskan kepada dampak program SANIMAS dala pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bagan Deli, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pada tahun 2012 program SANIMAS yang ada di Kelurahan Bagan Deli sudah terlaksana dengan baik, karena program tersebut memberikan dampak yang positif bagi kesehatan masyarakat dan meningkatkan derajat masyarakat yang ada di Kelurahan Bagan Deli tersebut hal ini

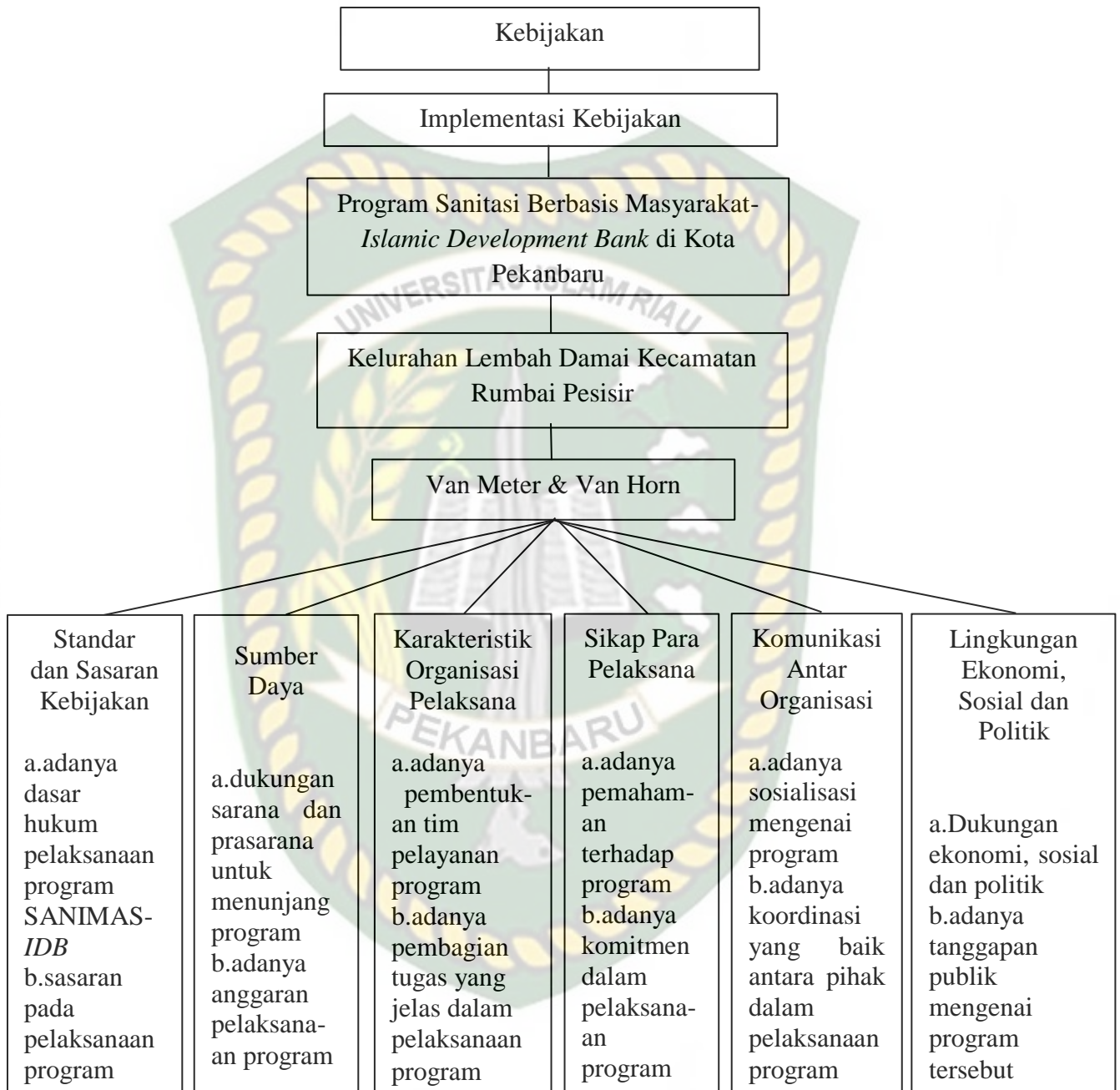
dilihat dari hasil wawancara, observasi dan data sekunder yang menunjukkan bahwa indikator dalam evaluasi hasilnya cukup baik.

Rencana yang akan penulis teliti berbeda dari penelitian-penelitian yang sudah ada, adapun yang membedakannya adalah pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada Pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat yang menggunakan dana pinjaman dari *Islamic Development Bank* (SANIMAS-IDB), selanjutnya dana tersebut digunakan untuk membangun sarana fisik yaitu Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir

### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir menurut Uma Sekaran ( dalam Sugiyono, 2011) adalah suatu model konseptual tentang bagaimana suatu teori dapat berhubungan dengan berbagai faktor lainnya yang penting.

**Gambar II.1 Implementasi Program SANIMAS-IDB di Kota Pekanbaru (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)**



*Sumber: Modifikasi Penulis 2020.*

#### D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian yang berjudul Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat- Islamic Development Bank di Kota Pekanbaru ( Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir) adalah :

1. Pemerintah adalah organisasi yang diberi kekuasaan secara penuh dan memiliki wewenang untuk membuat serta menerapkan peraturan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu wilayah sedangkan pemerintahan merupakan cara pemerintah untuk menjalankan wewenangnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah kota pekanbaru sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Kelurahan adalah Kelurahan Lembah Sari yang merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir
4. Kebijakan adalah kebijakan program Sanitasi Berbasis Masyarakat
5. Implementasi program adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan
6. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan program yang dilaksanakan untuk memperbaiki lingkungan khususnya untuk mengatasi permasalahan air limbah
7. Implementasi program SANIMAS-*IDB* adalah bentuk nyata pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* di lapangan yang dilakukan oleh pihak tercantum di dalam kebijakan dan juga masyarakat
8. Instalasi Pembuangan Air Limbah Komunal adalah sarana penunjang yang ada di dalam program SANIMAS-*IDB* yang digunakan untuk mengelola air limbah



9. Standar dan Sasaran Kebijakan merupakan suatu hal yang dilakukan untuk mengukur kinerja implementasi
10. Sumber daya adalah syarat berjalannya suatu organisasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi sumber daya, apabila memiliki sumber daya yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan dengan baik
11. Karakteristik organisasi pelaksana merupakan faktor penting di dalam implementasi kebijakan karena kinerja implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat dengan agen pelaksananya.
12. Sikap pelaksana merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan jika pelaksana mendukung implementasi kebijakan tersebut maka akan tercapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
13. Komunikasi antar organisasi adalah alat didalam suatu kebijakan untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang memiliki wewenang menjalankan kebijakan tersebut, semakin baik komunikasi antar pelaksana maka hasilnya akan baik pula.
14. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik merupakan suatu tindakan yang digunakan untuk menilai sejauh mana lingkungan eksternal mempengaruhi implementasi kebijakan publik.

### E. Operasional Variabel

**Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel Program Sanitasi Berbasis**

**Masyarakat -Islamic Development Bank di Kota Pekanbaru (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
<p>Kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Anderson dalam Agustino (2017:17).</p>	Implementasi	<p>1. Standar dan Sasaran Kebijakan</p> <p>2. Sumber Daya</p> <p>3. Karakteristik Organisasi Pelaksana</p> <p>4. Sikap Para Pelaksana</p> <p>5. Komunikasi antar</p>	<p>a. adanya dasar hukum pelaksanaan program SANIMAS-IDB</p> <p>b. Sasaran kebijakan program jelas</p> <p>a. tersedianya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program</p> <p>b. dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang program SANIMAS-IDB</p> <p>c. adanya anggaran untuk pelaksanaan program</p> <p>a. pembentukan tim pelayanan program</p> <p>b. adanya pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan program</p> <p>a. adanya pemahaman terhadap kebijakan program SANIMAS-IDB</p> <p>b. adanya komitmen dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB</p> <p>a. adanya sosialisasi</p>

		pelaksana	mengenai program b. adanya koordinasi yang baik antara pihak dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB
		6.Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	a.dukungan ekonomi, sosial dan politik b.adanya tanggapan publik mengenai implementasi kebijakan program sanimas-IDB

*Sumber: Modifikasi Penulis 2020*



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yakni memberikan gambaran tentang kondisi di lapangan dalam proses pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara. Menurut Moleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang memiliki maksud untuk mengetahui fenomena apa yang sedang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lain, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari pelaku yang diamati.

Menurut Sugiyono (2018:8) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif disebut juga metode artistik karena penelitiannya lebih bersifat seni dan juga disebut metode interpretive karena data yang diperoleh berkaitan dengan data dilapangan, alasan menggunakan metode kualitatif karena menurut peneliti metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami sesuatu yang tersembunyi terhadap suatu fenomena yang biasanya sulit dimengerti dan dipahami. Dengan demikian penelitian ini akan menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan yang dapat dipahami secara mendalam.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Lembah Sari yang merupakan kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir, alasan dilakukannya penelitian di kelurahan lembah sari tepatnya di Rt 1 Rw 1, karena lokasi tersebut merupakan salah



satu lokasi yang terpilih sebagai tempat pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* dalam pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal di Kota Pekanbaru, Kelurahan Lembah Sari tepatnya di Rt 1 Rw 1 dapat mewakili permasalahan yang sama mengenai program SANIMAS-*IDB* di beberapa kelurahan di kecamatan Rumbai Pesisir.

### **C. Informan dan Key Informan**

Informan menurut Moleong (2005:90) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mengenai latar belakang dari penelitian dan bersedia memberikan sebuah informasi mengenai situasi dan kondisi dari penelitian tersebut.

Key informan menurut Moelong (2005:3) adalah orang yang tidak hanya dapat memberikan informasi kepada penulis tetapi juga bisa memberikan saran tentang sumber bukti yang mendukung mengenai penelitian tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa key informan merupakan orang yang paling mengetahui tentang informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, pemilihan pihak yang menjadi sumber informasi peneliti dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik dalam pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian, adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel III.1 Informan dan Key Informan Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat- *Islamic Development Bank* di Kota Pekanbaru (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)**

Nama	Jabatan	Informan / Key Informan
Afrizal Zakir, ST., MT	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	Key Informan
Iif Syaefullah , S. STP, M. Si	Lurah Lembah Sari	Informan
Joni	Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Lembah Sari	Informan
Nuzul Bahri	Ketua KSM Puri Elok	Informan
Mirza	Ketua KPP RT 01 RW 01	Informan
Warga Rt 01 Rw 01 sebanyak 5 orang	-	Informan

#### **D. Teknik Pemilihan Informan**

Adapun cara penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, menurut Sugiyono (2016:82) teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data menggunakan pertimbangan dengan ciri-ciri tertentu, alasan penulis menggunakan teknik tersebut adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang sedang diteliti.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

##### **1. Data Primer**

Merupakan data yang didapatkan melalui wawancara penulis secara langsung dengan semua responden yang sudah disusun terlebih dahulu untuk memperoleh jawaban dari permasalahan.

## 2. Data Sekunder

Merupakan data tertulis yang didapatkan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari informan penelitian yakni lembaga atau instansi yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

#### a. Observasi

Menurut Sugiyono (2012:145) observasi adalah suatu kegiatan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri-ciri yang spesifik yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, proses pada suatu pekerjaan, gejala-gejala pada alam sekitar, dan responden yang diamati tidak terlalu luas. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti di lapangan guna mengetahui kejadian yang sebenarnya mengenai penelitian ini, penulis memilih teknik ini karena ingin mengetahui fakta yang terjadi di lapangan untuk melanjutkan penelitian penulis.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung dengan para responden mengenai permasalahan penelitian yang akan diteliti, wawancara dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada informan penelitian mengenai permasalahan yang ada. Menurut Blaxter, Hughes, dan Thight (2001) metode wawancara merupakan metode yang melibatkan pengajuan pertanyaan atau pembahasan mengenai suatu hal dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Ada beberapa macam cara wawancara menurut Patton (dalam Moeloeng, 2013) :

1. Wawancara pembicaraan informal (yaitu mengajukan pertanyaan yang bergantung kepada pewawancara )

2. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara (yaitu menggunakan pedoman dalam wawancara)
3. Wawancara baku terbuka ( yaitu menggunakan pertanyaan yang baku )

c. Dokumentasi

Menurut Danial (2009:79) studi dokumentasi adalah proses mengumpulkan sejumlah dokumen yang dibutuhkan untuk dijadikan data informasi berkaitan dengan masalah penelitian yang meliputi peta, jumlah dan nama pegawai, data penduduk, foto, dan lain-lain. Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa gambar maupun yang lain yang berkaitan dengan penelitian sehingga membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian secara langsung kelapangan.

**G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu langkah yang paling menentukan dalam suatu penelitian karena berguna untuk menyimpulkan hasil dari penelitian, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, setelah melakukan proses wawancara untuk selanjutnya data dianalisis secara terus menerus dalam setiap tahap penelitian sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan dan memberikan saran.

Menurut Sugiyomo (2009:224) teknik pengumpulan data adalah bagian yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuannya adalah mendapatkan data tersebut, selanjutnya menurut Sugiyono (2009;225) juga menjelaskan bahwa dalam suatu penelitian kualitatif pengumpulan data-data dilakukan dengan cara alami, memiliki sumber data yang primer, dan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi.



## H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III.2 : Jadwal waktu dan kegiatan dalam penelitian mengenai Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat-Islamic Development Bank di Kota Pekanbaru (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)**

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Kegiatan Tahun 2020-2021																							
		Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																								
2	Seminar UP																								
3	Perbaikan Hasil Seminar																								
4	Pengurusan Rekomendasi Lapangan																								
5	Penelitian Lapangan																								
6	Analisis Data																								
7	Penyusunan Skripsi																								
8	Konsultasi Perbaikan Skripsi																								
9	Ujian Skripsi																								
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																								
11	Penyerahan Skripsi																								

Sumber: Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fisipol-UIR 2020.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

##### 1. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau yang memiliki sejarah dalam proses pembentukannya, nama pekanbaru dahulunya dikenal sebagai “Senapelan” dipimpin oleh kepala suku yang disebut Batin Daerah yang pada awalnya daerah itu merupakan ladang lalu menjadi perkampungan dan kemudian diberi nama Dusun Payung Sekaki namun pada saat itu nama pekanbaru lebih dikenal dengan nama Senapelan.

Dalam perkembangannya, daerah Senapelan sangat dipengaruhi oleh Kerajaan Siak Sri Indra Pura, pada saat itu sultan memiliki inisiatif untuk membangun pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berjalan dengan baik, kemudian usaha yang dirintisnya tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang memiliki gelar Sultan Muhammad Ali Bin Abdul Jalil Muazamsyah.

Pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M berdasarkan catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, nama Senapelan kemudian dipopulerkan menjadi “Pekanbaru” oleh Sultan Muhammad Ali dibawah pemerintahan Sultan Yahya. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Pekanbaru.

## 2. Letak Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak diantara 101<sup>0</sup>14'-101<sup>0</sup>34' Bujur Timur dan 0<sup>0</sup>25-0<sup>0</sup>45'

Lintang Utara, dengan batas administrasi sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Luas kota pekanbaru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Daerah Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa, namun dengan meningkatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kepadatan penduduk kemudian dikeluarkanlah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2003 yang berisi pembentukan Kecamatan Baru menjadi 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, dan kemudian disahkan Peraturan Daerah No.4 tahun 2016 tentang pembentukan kelurahan di kota pekanbaru menjadi 83 Kelurahan/Desa.

**Tabel IV.1 jumlah Kelurahan menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 2020**

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Tampan	9
2.	Payung Sekaki	7
3.	Bukit Raya	5
4.	Mar poyan Damai	6
5.	Tenayan Raya	13
6.	Lima Puluh	4
7.	Sail	3
8.	Pekanbaru Kota	6
9.	Sukajadi	7
10.	Senapelan	6
11.	Rumbai	9
12.	Rumbai Pesisir	8
<b>Jumlah</b>		<b>83</b>

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2020

## B. Gambaran Umum Kecamatan Rumbai Pesisir

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru, Luas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah 157,33 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh kepusat Kota Pekanbaru ± 6 Km.

**Tabel IV.2 Nama Kelurahan dan luas wilayah di Kecamatan Rumbai Pesisir**

No.	Kelurahan	Luas Wilayah
1.	Meranti Pandak	3,88 Km <sup>2</sup>
2.	Limbungan	27 Km <sup>2</sup>
3.	Lembah Sari	9,85 Km <sup>2</sup>
4.	Lembah Damai	33 Km <sup>2</sup>
5.	Limbungan Baru	2,09 Km <sup>2</sup>
6.	Tebing Tinggi Okura	9,4 Km <sup>2</sup>
7.	Sungai Ambang	42,33 Km <sup>2</sup>
8.	Sungai Ukai	29,78 Km <sup>2</sup>

Sumber: Kecamatan Rumbai Pesisir dalam angka 2019

Berikut merupakan batas-batas wilayah di Kecamatan Rumbai Pesisir :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Perawang Kabupaten Siak Sri
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Lima Puluh

**Tabel IV.3 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kelurahan di Kecamatan Rumbai Pesisir 2018**

No	Kelurahan	Ketinggian (m)
1.	Meranti Pandak	8,0
2.	Limbungan	7,0
3.	Lembah Sari	18,0
4.	Lembah Damai	16,0
5.	Limbungan Baru	9,0
6.	Tebing Tinggi Okura	9,0
7.	Sungai Ambang	38,0
8.	Sungai Ukai	43,0
<b>Rata-rata</b>		<b>18,5</b>

Sumber : Kecamatan Rumbai Pesisir Dalam Angka 2019.



## C. Kelurahan Lembah Sari

### 1. Gambaran Umum Kelurahan Lembah Sari

Kelurahan Lembah Sari merupakan Kelurahan yang terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir, wilayah kelurahan Lembah Sari memiliki wilayah yang sebagian besar daerahnya merupakan perbukitan, kelurahan Lembah Sari memiliki Visi sebagai berikut:

- 1) Menjadikan Kelurahan Lembah Sari sebagai pusat perekonomian masyarakat
- 2) Menjadikan Kelurahan Lembah Sari sebagai pusat perdagangan dan jasa
- 3) Menjadikan Kelurahan Lembah Sari sebagai kelurahan yang sejahtera dan bernuansa agamis

Sedangkan Misi Kelurahan Lembah Sari adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan yang terbaik dan tepat waktu kepada masyarakat
- 2) Memberikan informasi dan komunikasi secara terbuka kepada masyarakat.
- 3) Menciptakan hubungan yang harmonis antar agama, suku dan etnis.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Lembah Sari.

### 2. Letak Geografis Kelurahan Lembah Sari

Secara geografis Kelurahan Lembah Sari terletak pada koordinat  $101^{\circ}27'16,4''$  Bujur Timur sampai  $00^{\circ}34'25,9''$  Lintang Utara, Luas wilayah Kelurahan Lembah Sari  $\pm 7,97 \text{ Km}^2$ . Berikut merupakan batas-batas wilayah Kelurahan Lembah Sari, yaitu :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Limbungan Baru
- b. Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kelurahan Lembah Damai
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tebing Tinggi Okura
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Limbungan
- e. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tebing Tinggi Okura

### 3. Kondisi Demografi Kelurahan Lembah Sari

#### 1. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin

**Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Kelurahan Lembah Sari Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Rw	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	01	560	590	1.150
2.	02	783	804	1.587
3.	03	287	203	490
4.	04	779	590	1.369
5.	05	996	861	1.857
6.	06	433	269	702
7.	07	318	297	615
8.	08	266	220	486
9.	09	346	271	617
10.	10	520	526	1.046
11.	11	397	479	876
12.	12	519	387	906
13.	13	287	359	646
14.	14	438	371	809
<b>Jumlah</b>		<b>6.929</b>	<b>6.227</b>	<b>13.156</b>

Sumber: Kelurahan Lembah Sari 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di kelurahan lembah sari pada tahun 2020 sebanyak 6.929 jiwa sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 6.227 jiwa dan untuk keseluruhan penduduk berjumlah 13.156 jiwa

#### 2. Jumlah Penduduk Menurut Umur

**Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Kelurahan Lembah Sari Berdasarkan Umur**

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk
1.	0-4	882
2.	5	1.110
3.	6	1.105
4.	7-12	1.348
5.	13-15	1.342
6.	16	1.022
7.	17	1.084
8.	18	1.096

9.	19-24	1.311
10.	24-25	1.400
11.	26	1.456
<b>JUMLAH</b>		<b>13.156</b>

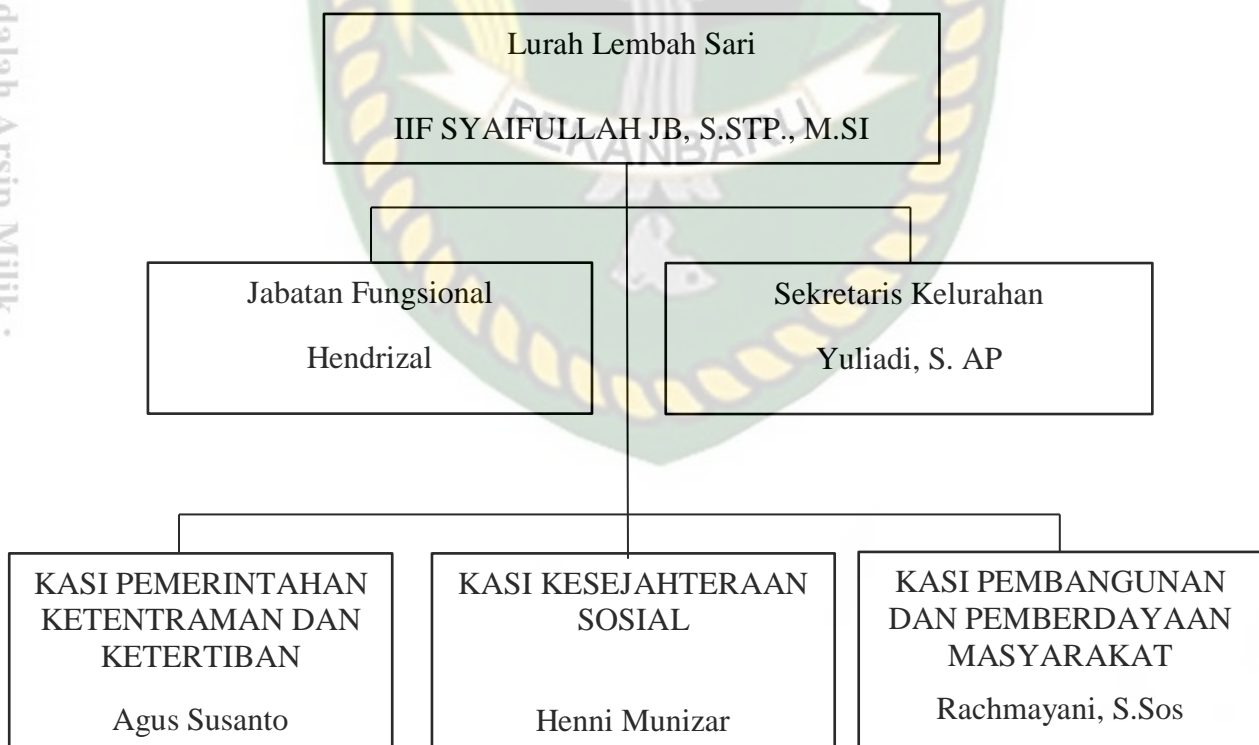
Sumber: Kelurahan Lembah Sari 2020

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Lembah Sari

Struktur organisasi Kelurahan Lembah Sari adalah sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris Kelurahan
3. Kasi Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban
4. Kepala seksi Kesejahteraan Sosial
5. Kepala seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Lembah Sari 2020



Sumber: Kantor Lurah Lembah Sari 2020

## **D. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru**

### **1. Profil Singkat Dinas Perkrim Kota Pekanbaru**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru ini memiliki tugas untuk membantu Walikota Pekanbaru dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru .

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru secara kelembagaan merupakan satuan kerja perangkat daerah kota pekanbaru yang memiliki tugas urusan pemerintahan daerah mengenai Perumahan dan Permukiman, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

### **2. Visi dan Misi Dinas Perkrim Kota Pekanbaru**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru memiliki Visi “Terwujudnya infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang handal, dan berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera” sedangkan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut , yaitu :

- a. Meningkatkan efektifitas, efisiensi serta akuntabilitas pelayanan internal dan eksternal
- b. Memberdayakan masyarakat dan pihak lainnya dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman
- c. Meningkatkan kualitas wilayah permukiman dan usaha masyarakat melalui pencegahan serta pengendalian kawasan kumuh perkotaan



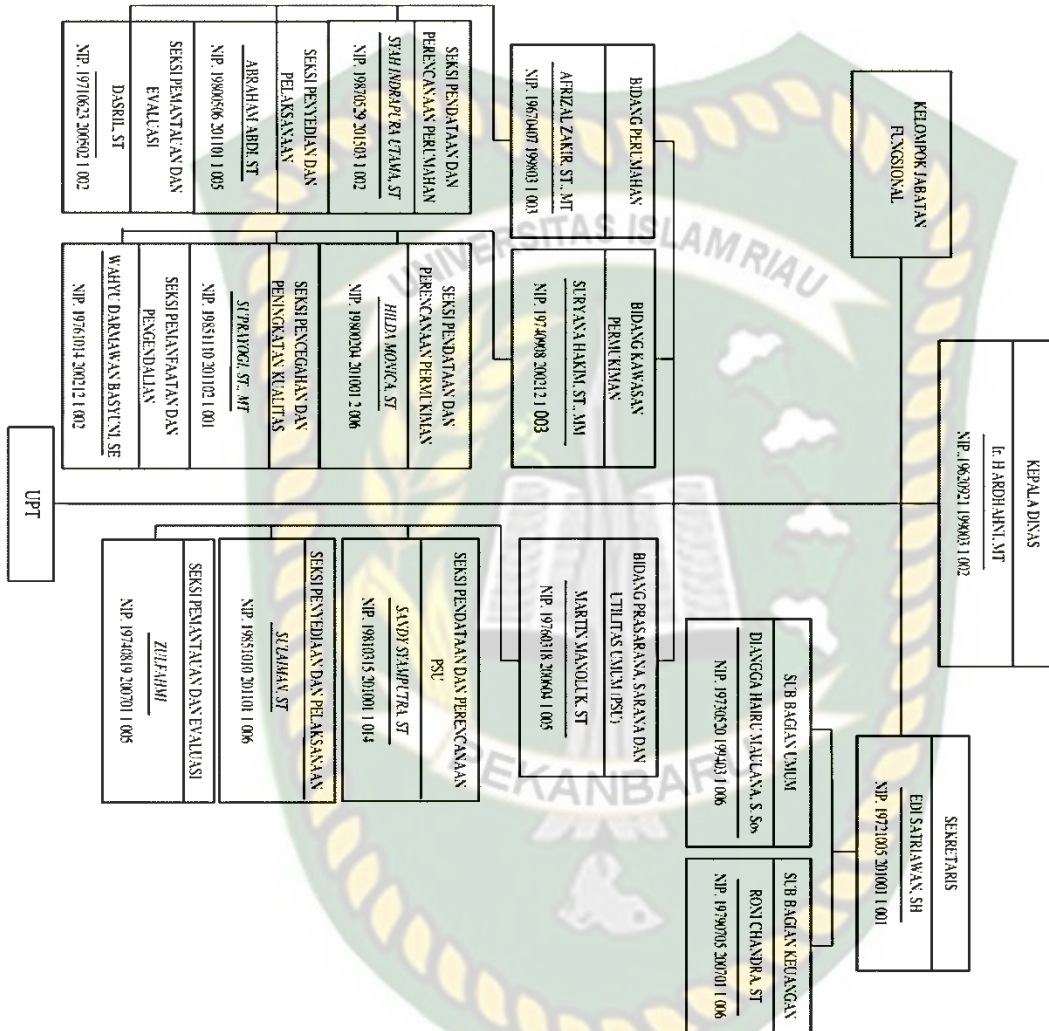
- d. Memberikan fasilitas dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman
- e. Meningkatkan ketersediaan layanan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat
- f. Menciptakan lingkungan yang sehat dan aman serta didukung sarana, prasarana dan utilitas umum
- g. Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**Gambar IV.2 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru**



Peraturan Walikota Pekanbaru  
 Nomor: 95 Tahun 2016  
 Tanggal: 30 September 2016

Sumber: Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru

Adapun Tugas dan fungsi masing-masing bidang di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota pekanbaru, adalah sebagai berikut, yaitu :

## 1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan lainnya.
- b. Kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :
  - a) Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman.
  - c) Pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
  - d) Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang perumahan dan permukiman.
  - e) Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
  - f) Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretaris

- a. Sekretaris memiliki tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, yaitu :
  - a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman kota pekanbaru.

- b) Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d) Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e) Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f) Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungan, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Sub Bagian Umum

- a. Sub bagian umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja sub bagian umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Sub bagian umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - a) Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.



- b) Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengelolaan data dan informasi sub bagian umum.
- c) Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e) Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f) Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan BMD.
- g) Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- h) Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- i) Pengurusan penggunaan dan pemeliharaan BMD.
- j) Perumusan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- k) Pengolahan data pegawai, formasi, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penyusunan Daftar Urus Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.

1) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Sub Bagian Keuangan

- a. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Reja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja dinas.
  - 3) Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
  - 4) Perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
  - 5) Pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
  - 6) Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
  - 7) Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
  - 8) Melaksanakan verifikasi harian atas permintaan.

- 9) Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- 10) Pelaksanaan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas,
- 11) Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 12) Penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- 13) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Perumahan

- a. Bidang perumahan memiliki tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perumahan.
- b. Bidang perumahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, yaitu :
  - a) Pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
  - b) Perencanaan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - c) Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

- d) Penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan rumah bantuan swadaya.
- e) Penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada.
- f) Pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- g) Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- h) Pelaksanaan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil serta rumah bantuan swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperlihatkan sosial dan budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan.



- i) Pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan rumah bantuan swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan.
- j) Penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- k) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun yaitu rumah khusus, rumah umum, rumah negara, rumah komersi dan bantuan rumah swadaya yang dibangun oleh pemerintah dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta swasta.
- l) Pelaksanaan koordinasi dan perumusan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m) Penyediaan atau pelaksanaan fasilitas rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil.
- n) Penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan perumahan

- o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang perumahan, membawahi :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan
2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

6. Bidang Kawasan Permukiman

- a. Bidang kawasan permukiman mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan kawasan permukiman.
- b. Bidang kawasan permukiman dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
  - 2) Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
  - 3) Pelaksanaan koordinasi dan perumusan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya.
  - 4) Pelaksanaan koordinasi dan perumusan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan bidang kawasan permukiman.
  - 5) Pelaksanaan koordinasi dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman.

- 6) Penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh diwilayah kota.
- 7) Pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
- 8) Pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
- 9) Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan kawasan permukiman.
- 10) Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan permukiman.
- 11) Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan kumuh.
- 12) Penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- 13) Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14) Memanfaatkan dan mengendalikan kawasan permukiman.
- 15) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Permukiman

2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian

7. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

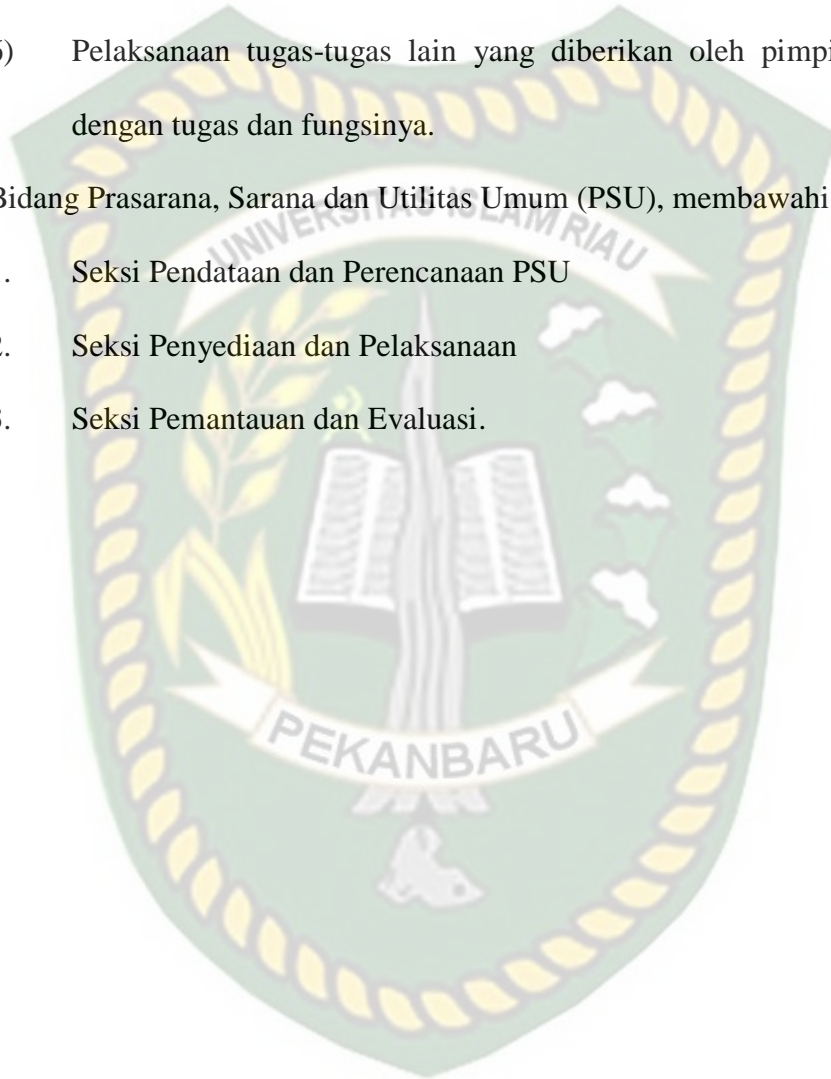
- a. Bidang Prasarana, sarana dan Utilitas umum (PSU) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub bagian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
- b. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
  - 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan, lingkungan, drainese lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
  - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman, jalan lingkungan, drainese lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
  - 3) Penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, drainese lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
  - 4) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainese lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.



- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), membawahi:

1. Seksi Pendataan dan Perencanaan PSU
2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan
3. Seksi Pemantauan dan Evaluasi.



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang berjudul Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat- Islamic Development Bank di Kota Pekanbaru (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir). Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil keputusan. Adapun data berupa identitas dan hasil wawancara dari informan yang didapatkan dalam penelitian ini memberikan gambaran dari informan dalam penelitian ini, yang akan dipaparkan sebagai berikut :

#### A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru , 1 (satu) orang Lurah Lembah Sari, 1 (satu) orang Ketua Rt 01 Rw 01 Kelurahan Lembah Sari, 1 (satu) orang Ketua KSM Puri Elok, 1 (satu) orang Ketua KPP Rt 01 Rw 01, warga Rt 01 Rw 01 sebanyak 5 (lima) orang.

##### 1. Identitas Responden berdasarkan jenis kelamin

Untuk dapat melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat jenis kelamin dari responden yang ada didalam penelitian ini.

**Tabel V.1 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	7	70%
2	Perempuan	3	30%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Olahan Penulis 2020*

## 2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperolehlah identitas dari responden penelitian berdasarkan umur.

**Tabel V.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	19-29	1	10%
2	30-40	1	10%
3	41-51	2	20%
4	52-62	5	50%
5	63-73	1	10%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020.*

## 3. Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan

Dari hasil wawancara dilapangan, maka diperolehlah identitas responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan.

**Tabel V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMP/SLTP	2	20%
2	SMA/SLTA	4	40%
3	Diploma Tiga (D3)	2	20%
4	Strata Satu (S1)	1	10%
5	Strata Dua (S2)	1	10%
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020.*

**B. Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat- *Islamic Development Bank* di Kota Pekanbaru (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir)**

Menurut Grindle (dalam Mulyadi, 2015:47) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses umum dalam Tindakan administratif yang dapat diteliti pada suatu program tertentu, sedangkan menurut Gordon (dalam Mulyadi, 2015:24) menjelaskan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan yang berkaitan dengan realisasi program.

Implementasi program Sanitasi Berbasis Masyarakat- *Islamic Development Bank* yang telah terlaksana di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperbaiki sanitasi dasar dan penyediaan sarana prasarana air limbah permukiman untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tinggal di lingkungan padat penduduk. Program tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan yang membutuhkan partisipasi masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pengguna Pemelihara (KPP) untuk menggunakan serta memelihara bangunan fisik dari program SANIMAS-*IDB* yaitu Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengelola air limbah rumah tangga baik air limbah kamar mandi dan air limbah cucian piring.

Kegiatan dari program SANIMAS-*IDB* diharapkan dapat memberikan perubahan untuk lingkungan yang semulanya kumuh menjadi lingkungan yang bersih dan sehat serta mengurangi pencemaran air dan tanah. Namun dari hasil penelitian penulis dilapangan masih banyak masyarakat yang mengeluh akibat banyaknya saluran pipa yang bocor tetapi tidak kunjung diperbaiki. Untuk mengetahui jawaban dari informan



dan key informan mengenai Implementasi Program Sanitasi Berbasis Masyarakat-*Islamic Development Bank* (Studi di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir) dapat dilihat dalam beberapa indikator, sebagai berikut :

**a. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Menurut Sulastri (2012:1) standar adalah kesepakatan bersama yang berisi ciri-ciri yang ideal tentang suatu kebijakan, yang sudah akurat dan dapat dijadikan petunjuk dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sedangkan sasaran menurut Amitai Etzioni Sasaran merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh suatu lembaga baik itu secara jangka pendek atau jangka panjang untuk mengukur efektivitas kegiatan tersebut.

Menurut Van Meter dan Van Horn standar dan sasaran adalah suatu hal yang digunakan untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan, harus ada kejelasan dari standar dan sasaran kebijakan yang dicapai oleh pelaksana program, kinerja kebijakan adalah penilaian hasil pencapaian dari standar dan sasaran program tersebut, ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu sempurna maka akan lebih susah untuk dilaksanakan.

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, menjelaskan bahwa Standar merupakan spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan semua pihak yang terkait dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, Kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman untuk memperoleh manfaat yang besar.

Dalam hal pencapaian standar dan sasaran kebijakan agar tercapai sesuai dengan tujuan dan fungsinya yang dilaksanakan oleh pelaksana program SANIMAS-*IDB* baik ditingkat kota yaitu Dinas Perkrim, TFL maupun tingkat masyarakat yaitu KSM,KPP

untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan program dari aspek standar dan sasaran kebijakan, penulis menjabarkan dalam beberapa item penilaian yaitu sebagai berikut:

### **1. Adanya Dasar Hukum Pelaksanaan Program SANIMAS-IDB**

Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan atau penyelenggaraan oleh suatu individu ataupun suatu instansi agar dapat mengetahui posisi, batasan dan sanksinya. Menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis oleh Negara atau Pemerintah yang berisi tata cara tingkah laku manusia yang bersifat mengikat.

Definisi peraturan perundang-undangan menurut kontruksi UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Adanya dasar hukum atau peraturan perundang-undangan pada implementasi kebijakan program SANIMAS-IDB yang menjadi landasan bagi setiap tindakan dalam pelaksanaannya maka seharusnya program tersebut sudah berjalan dengan semestinya. Dengan adanya dasar hukum juga diharapkan dapat memperbaiki akses sanitasi di Kelurahan Lembah Sari, untuk melihat adanya dasar hukum dari Program SANIMAS-IDB, penulis uraikan hasil wawancara dengan informan dan key informan sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Afrizal Zakir selaku Pejabat Pembuat Komitmen SANIMAS-IDB di Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :

*“Program SANIMAS-IDB ini merupakan program turunan dari Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, mengenai dasar hukum dilaksanakannya program SANIMAS-IDB merupakan program untuk mencapai target sanitasi layak yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 mengenai pencapaian akses sanitasi layak, mengenai peraturan tentang mekanisme pencairan dana bantuan*

*dari Islamic Development Bank termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2015 tentang petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman Islamic Development Bank Nomor Ind-167 untuk Community Based Sanitation Program (SANIMAS), namun sampai saat ini belum ada peraturan yang menjelaskan mengenai program SANIMAS-IDB secara khusus di Kota Pekanbaru”. (02 November 2020, 11.22 Wib, di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru)*

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa, program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari dilaksanakan untuk mencapai target sanitasi layak pada akhir 2019 yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tentang RPJMN 2015-2019, serta peraturan tentang mekanisme pencairan dana bantuan dari *Islamic Development Bank* termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2015 tentang petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman Islamic Development Bank Nomor Ind-167 untuk *Community Based Sanitation Program* (SANIMAS).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara Bapak Nuzul Bahri Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Puri Elok selaku penyelenggara program di Kelurahan Lembah Sari mengatakan bahwa :

*“Kalau peraturannya ada berdasarkan peraturan presiden namun saya kurang paham karena saat awal sosialisasi oleh pihak dinas PUPR hanya disebutkan peraturan presiden nomor 2 saja tidak ada dijelaskan mengenai aturan dari program secara terperinci” (30 November 2020, di Rumah Bapak Nuzul Bahri).*

Dari hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa sampai saat ini belum ada aturan khusus yang menjelaskan mengenai pelaksanaan program SANIMAS yang didanai oleh pinjaman *Islamic Development Bank*.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mirza selaku Ketua KPP, megatakan bahwa:

*“Untuk dasar hukumnya saya kurang tau ya”(14 Desember 2020, di Rumah Bapak Mirza).*



Dari hasil wawancara penulis mengenai item adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa tidak semua pelaksana memahami dan mengerti mengenai dasar hukum pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih banyak penulis melakukan wawancara di lapangan dengan Bapak Lurah Lembah Sari, menyebutkan bahwa:

*“Sudah pasti semua program dilaksanakan berdasarkan peraturan, hanya saja dari awal sosialisasi program ini tidak ada dijelaskan dasar hukumnya yang mana dan seperti apa”*(07 Oktober 2020, di Kantor Kelurahan Lembah Sari).

Dari hasil wawancara diatas dengan Bapak Lurah Lembah Sari mengenai item adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa sudah ada dasar hukum program SANIMAS-*IDB*, tetapi tidak ada penjelasan secara rinci mengenai landasan dilaksanakannya program tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Joni selaku Ketua Rt 01 Rw 01, mengatakan bahwa:

*“Saya tidak tahu mengenai aturan-aturannya ya soalnya tidak pernah diberi tahu”*(22 November 2020, di Rumah Bapak Joni).

Dari hasil wawancara diatas dengan Bapak Joni mengenai item adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa kurang optimalnya penyampaian informasi mengenai landasan program SANIMAS-*IDB*.

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat dijelaskan bahwa Dasar Hukum dalam program SANIMAS-*IDB* sudah ada yaitu Perpres No.2 tentang RPJM 2015-2019 namun dalam pelaksanaannya para pelaksana tingkat masyarakat tidak mengerti mengenai dasar hukumnya sendiri hal tersebut terjadi karena pada saat sosialisasi tidak



ada dijelaskan secara rinci mengenai peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan program tersebut

## 2. Adanya Sasaran Kebijakan yang Jelas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sasaran adalah sesuatu yang menjadi tujuan. Sasaran program SANIMAS-*IDB* adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah yang tinggal di lingkungan kumuh padat penduduk di daerah perkotaan dan semi perkotaan yang pernah mendapat bantuan program PNPM Mandiri. Dalam hal ini untuk melihat bagaimana kejelasan sasaran dari kebijakan program SANIMAS-*IDB*, penulis menjabarkan wawancara dengan informan dan key informan sebagai berikut, yaitu:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Pejabat Pembuat Komitmen SANIMAS-*IDB* Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa :

*“Sasaran dari program SANIMAS-IDB ini adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tinggal didaerah padat penduduk seperti Kelurahan Lembah Sari yang ditetapkan menjadi lokasi permukiman kumuh sesuai dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 189 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Pekanbaru dan daerah target program SANIMAS-IDB juga merupakan lokasi yang pernah mendapat bantuan program PNPM Mandiri”*(02 November 2020, 11.22 Wib, di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru).

Dari hasil wawancara diatas, penulis menganalisis bahwa sasaran program SANIMAS-*IDB* merupakan masyarakat kelurahan lembah sari yang mayoritas berpenghasilan rendah dan merupakan daerah yang pernah mendapatkan bantuan program PNPM Mandiri pada tahun 2013.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Lurah Lembah Sari menjelaskan bahwa :

*“Program SANIMAS-IDB sangat tepat dilaksanakan di Kelurahan Lembah Sari karena kelurahan lembah sari merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan juga mempunyai 70% penduduk dengan ekonomi menengah kebawah, sehingga masih banyak masyarakat disini yang belum memiliki akses sanitasi yang layak yang menyebabkan timbulnya penyakit*

*menular seperti ispa dan lain-lain, namun dengan dibangunnya IPAL dari program SANIMAS-IDB dapat membantu masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat” (27 Oktober 2020, di Kantor Kelurahan Lembah Sari).*

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Lurah Lembah Sari mengenai item adanya sasaran kebijakan yang jelas, penulis menganalisis bahwa masih banyak masyarakat lembah sari yang belum memiliki akses sanitasi yang baik dikarenakan 70% masyarakat memiliki penghasilan yang rendah.

Sementara menurut Bapak Mirza selaku Ketua KPP, berdasarkan wawancara penulis dilapangan menjelaskan bahwa :

*“Di Kota Pekanbaru masih banyak daerah Kumuh termasuk Kelurahan Lembah Sari yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakat dikelurahan lembah sari ini belum memiliki kebiasaan untuk hidup sehat seperti masih banyak masyarakat yang membuang air limbah cucian piring dan kamar mandi di halaman rumah mereka sehingga menyebabkan halaman rumahnya bau dan juga tidak sehat, hal itu terjadi karena masyarakat belum punya akses sanitasi yang memadai, jadi Program SANIMAS-IDB ini sangat tepat dilaksanakan di Kelurahan Lembah Sari”(14 Desember 2020, di rumah Bapak Ketua Kelompok Pemanfaat dan Pengelola).*

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua KPP mengenai item adanya sasaran kebijakan yang jelas, penulis menganalisis bahwa masih banyak masyarakat yang membuang air limbah cucian piring dan limbah kamar mandi sembarangan ke halaman rumah mereka yang menyebabkan lingkungan Rt 01 Rw 01 Kelurahan Lembah Sari menjadi kumuh.

Menurut Bapak Joni selaku Ketua Rt 01 Rw 01 Kelurahan Lembah Sari, berdasarkan wawancara penulis dilapangan, beliau menjelaskan bahwa :

*“ Menurut saya program SANIMAS-IDB sangat sesuai dilaksanakan di Kelurahan Lembah Sari terutama untuk di di Rt 01 ini karena sebelumnya masyarakat disini belum mempunyai akses untuk air limbah yang baik sehingga air limbah rumah tangga dibuang sembarangan seperti masyarakat yang rumahnya di dekat sungai mereka membuang air limbah cuci piring dan kamar mandi langsung ke sungai, yang menyebabkan sungai di Rt 01 ini menjadi tercemar, namun saat ini air di sungai-sungai yang ada di Rt 01 ini sudah jernih*

*kembali” (14 Desember 2020, di Rumah Bapak Ketua Rt 01 Rw 01 Kelurahan Lembah Sari).*

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Ketua Rt 01 Rw 01 Kelurahan Lembah Sari penulis menganalisis bahwa selain membuang air limbah rumah tangga ke halaman rumah, masyarakat lembah sari juga membuang air limbah kesungai disekitar halaman rumah mereka yang mengakibatkan air sungai di sekitar Rt 01 Rw 01 menjadi tercemar.

Berdasarkan hasil Observasi penulis dilapangan mengenai item adanya sasaran kebijakan yang jelas, dapat disimpulkan bahwa sasaran dari kebijakan program SANIMAS-IDB ini sudah tepat yaitu masyarakat Rt 01 Rw 01 Kelurahan Lembah Sari yang mayoritas berpenghasilan rendah serta tinggal di lingkungan padat penduduk namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena masih banyak masyarakat yang lebih tidak mampu justru tidak mendapat bantuan program tersebut.

#### **b. Sumber Daya**

Secara umum sumber daya merupakan sesuatu hak yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Menurut Grima dan Berkes (1989) dalam Fauzi (2004) sumber daya adalah aset yang digunakan untuk menunjang kehidupan manusia, menurut Van Meter dan Van Horn faktor sumber daya sangat penting dalam implementasi kebijakan, keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan dapat dilihat dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasarana dan sumber daya finansial yang menjadi penilaian yang penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan jika anggaran dana kurang atau bahkan tidak tersedia maka implementasi tidak berhasil.

Menurut UU Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup menjelaskan bahwa sumber daya merupakan lingkungan hidup yang



terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan.

Untuk melihat bagaimana sumber daya yang ada didalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis memiliki dua item penilaian yang penulis jadikan pertanyaan dalam wawancara, untuk selanjutnya dianalisis dan penulis jabarkan sebagai berikut:

### **1. Tersedianya Sumber Daya Manusia dalam Implementasi Program SANIMAS-*IDB***

Menurut Wirawan (2012) menjelaskan bahwa Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang digunakan untuk menjalankan sumber daya yang lainnya seperti sumber daya finansial, SDA, sumber daya teknologi, sumber daya ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan menurut Sadli Samsudin (2010:1) menyebutkan bahwa SDM merupakan orang yang menghasilkan barang atau jasa serta memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi.

Tersedianya SDM dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* merupakan salah satu unsur penting agar program tersebut dapat berjalan dengan baik. Untuk mengetahui bagaimana sumber daya manusia dalam implementasi program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari, penulis menjabarkan hasil wawancara dengan informan dan key informan, sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Afrizal Zakir selaku Ketua PPK program, menjelaskan bahwa:

*“Untuk sumber daya manusia dalam pelaksanaan program ini sudah cukup baik ya”*(02 November 2020, di Kantor Dinas Perkrim Kota Pekanbaru).

Dari hasil wawancara penulis diatas penulis menganalisis bahwa SDM dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari sudah tersedia seperti adanya TFL, KSM, KPP.



Selanjutnya untuk mendapatkan informasi penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nuzul Bahri selaku Ketua KSM beliau menjelaskan bahwa:

*“Saya rasa sudah cukup ya, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum efektif dalam menjalankan peran masing-masing mungkin karna terhambat pendidikan yang rendah” (30 November 2020, di Rumah Bapak Nuzul Bahri).*

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak ketua KSM terkait item tersedinya SDM dalam implementasi program SANIMAS-IDB penulis menganalisis bahwa SDM sudah tersedia hanya saja dalam pelaksanaannya masih belum optimal karena minimnya Pendidikan para pelaksana seperti anggota KSM dan KPP yang mayoritas hanya lulusan Sekolah Dasar dan menyebabkan sulitnya memahami tugasnya masing-masing.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mirza selaku Ketua KPP, menjelaskan bahwa:

*“Saya kira perlu ditingkatkan untuk sumber daya manusia nya ya karena kami juga masih kekurangan anggota” (14 Desember 2020, di Rumah Bapak Mirza).*

Berdasarkan wawancara diatas dengan bapak ketua KPP selaku pemanfaat sekaligus pemelihara sarana SANIMAS-IDB penulis menganalisis bahwa jumlah SDM yang ada di KPP masih belum cukup dikarenakan KPP terdiri dari 1 Ketua, 1 sekretaris, 1 bendahara dan 2 anggota yang dinilai kurang efektif untuk melaksanakan tugas yang cukup banyak.

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak iif selaku Lurah Lembah Sari, menjelaskan bahwa:

*“Saya rasa sudah lumayan baik untuk SDM nya, seperti anggota KSM dan KPP yang sudah cukup mengerti mengenai program tersebut dan mereka juga cukup aktif, dulu sering juga kekantor untuk konsultasi masalah program tersebut” (27 oktober 2020, di Kantor Kelurahan Lembah Sari).*

Berdasarkan wawancara penulis dengan lurah lembah sari mengenai SDM dalam program SANIMAS-IDB penulis menganalisis bahwa meskipun SDM terkendala

dengan Pendidikan namun dalam penyelenggaraanya para pelaksana ditingkat masyarakat baik KSM maupun KPP sudah cukup aktif.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan mengenai item tersedianya SDM dalam implementasi program, dapat dijelaskan bahwa SDM dalam program SANIMAS-*IDB* sudah cukup baik seperti jumlah SDM masing-masing kelompok yang sudah cukup banyak seperti pelaksana ditingkat masyarakat yaitu KSM dan KPP yang masing-masing beranggotakan 5 orang, namun masih ditemukan kendala SDM dalam hal pendidikan yaitu banyak pelaksana yang belum cukup memiliki pengetahuan mengenai program SANIMAS-*IDB* akibatnya implementasi program kurang maksimal, hal tersebut terjadi karena mayoritas anggota pelaksana hanya lulusan Sekolah Dasar.

## **2. Dukungan Sarana Prasarana dalam implementasi Program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari**

Menurut Soebroto (dalam Arianto, 2008) mengatakan bahwa sarana prasarana adalah segala sesuatu berupa benda ataupun uang, yang dapat mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri menjelaskan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarannya suatu proses.

Sarana prasarana dalam program SANIMAS-*IDB* merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang pelaksanaan program tersebut jika tidak ada sarana prasarana maka implementasi program tidak akan berjalan dengan baik. Untuk melihat sarana prasarana dalam program SANIMAS-*IDB* penulis memiliki dua item yang dijadikan

pertanyaan dalam wawancara dengan informan dan key informan yang penulis jabarkan, sebagai berikut:

Dari wawancara penulis dilapangan dengan Bapak Afrizal Zakir selaku ketua PPK, menjelaskan bahwa :

*“Sarana Prasarana untuk mendukung program SANIMAS-IDB sudah tersedia dengan sistem yang dipilih masyarakat yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal (IPAL Komunal) dengan sistem jaringan perpipaan, komponen IPAL terdiri dari Bak perata, Bak inlet, Bak pengendap atau settler dan bak anaerobik filter dan perlengkapan jaringan perpipaan seperti main-holes itu sudah tersedia” (02 November 2020, di kantor Dinas Perkrim Kota Pekanbaru).*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Pejabat Pembuat Komitmen mengenai item dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB penulis menganalisis bahwa sudah tersedia sarana sanitasi berupa bangunan IPAL Komunal.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nuzul Bahri selaku ketua KSM Puri Elok, mengatakan bahwa :

*“Untuk sarana program SANIMAS-IDB di jalan Pramuka Rt 01 Rw 01 ini sudah dibangun IPAL Komunal sebagai tempat penampungan air limbah yang akan diolah sebelum di alihkan ke sungai supaya air limbah jadi jernih dan bersih” (30 November 2020, di Rumah Bapak Nuzul Bahri).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menganalisis bahwa IPAL Komunal merupakan sarana SANIMAS-IDB yang dipilih untuk menangani masalah air limbah rumah tangga di Kelurahan Lembah Sari, bangunan IPAL Komunal beserta komponen lainnya sudah tersedia.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Lurah Lembah Sari dijelaskan bahwa :

*“Sudah ada sarana untuk mendukung program SANIMAS-IDB ini yaitu bangunan IPAL Komunal yang dibangun di Rt 01 Rw 01 yang dibangun oleh masyarakat secara gotong royong” (27 Oktober 2020, di Kantor Kelurahan Lembah Sari).*



Berdasarkan wawancara diatas penulis menganalisis bahwa sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) yang ada di Rt 01 Rw 01 Kelurahan Lembah Sari, dibangun secara gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat sekitar baik laki-laki maupun perempuan ikut bekerjasama membangun IPAL Komunal di Kelurahan Lembah Sari.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Mirza selaku Ketua KPP, menjelaskan bahwa :

*“Bangunan IPAL Komunal yang ada di Rt 01 Rw 01 itu merupakan sarana dari program SANIMAS-IDB yang sudah dibangun dari 2018 dan selesai di tahun 2019” (14 Desember 2020, di rumah Bapak Ketua KPP).*

Berdasarkan wawancara dengan ketua KPP penulis menganalisis bahwa sarana SANIMAS-IDB dibangun sejak tahun 2018 dan selesai pembangunan serta mulai digunakan oleh masyarakat pada tahun 2019 hingga sekarang.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih akurat penulis melakukan wawancara penulis dengan Ibu Zamriah selaku masyarakat pemanfaat program, yang menjelaskan bahwa :

*“Hanya bangunan IPAL itu sarana yang saya tau dari program SANIMAS-IDB, katanya diatas bangunan itu akan disediakan sarana bermain anak-anak dan belajar, sarana untuk posyandu juga tetapi sampai saat ini belum tersedia” (14 Desember 2020, di rumah Ibu Zamriah).*

Berdasarkan wawancara diatas penulis menganalisis bahwa sarana penunjang program SANIMAS-IDB yang pada perencanaanya akan diberikan di atas bangunan IPAL Komunal agar dapat dimanfaatkan lebih maksimal oleh masyarakat seperti sarana taman belajar anak-anak dan posyandu, namun kenyataanya tidak ada sarana penunjang yang disebutkan pada awal perencanaan.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat pemanfaat yaitu ibu Nurhayati menjelaskan bahwa:



*“Memang sudah ada sarana untuk program tersebut seperti bangunan IPAL, namun menurut saya seharusnya bangunan tersebut memiliki fungsi lebih selain hanya untuk pengelolaan air limbah seperti di daerah lain setau saya diatas lahan IPAL itu disediakan fasilitas untuk belajar anak-anak seperti buku, bisa juga untuk tempat mengaji, tetapi untuk di Kelurahan Lembah Sari tidak ada jadi bangunan itu digunakan hanya sekedar untuk pengelolaan limbah saja” (22 November 2020, di rumah Ibu Nurhayati).*

Berdasarkan wawancara diatas penulis menganalisis bahwa Ibu Nurhayati menyatakan Sarana SANIMAS-IDB yaitu berupa bangunan IPAL Komunal belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat seperti di daerah *best practice* program tersebut dikarenakan tidak ada sarana penunjangnya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat pemanfaat yaitu Bapak Yono, menjelaskan bahwa:

*“Sarana nya yang saya tau ya bangunan IPAL, main-hole untuk penyambung antara sambungan rumah itu saja” (22 November 2020, di rumah Bapak Yono).*

Berdasarkan wawancara mengenai dukungan sarana prasarana program SANIMAS-IDB penulis menganalisis bahwa bangunan IPAL Komunal sudah dilengkapi dengan bak pengontrol yang dibangun di halaman rumah warga penerima manfaat program tersebut.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Anang Subandi selaku masyarakat pemanfaat, mengatakan bahwa:

Berdasarkan wawancara diatas penulis menganalisis bahwa belum optimalnya pemanfaatan sarana IPAL Komunal yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam kegiatan warga namun kenyataanya hanya digunakan sebagai pengolah limbah saja.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nona selaku masyarakat pemanfaat, mengatakan bahwa :

*“Untuk program SANIMAS-IDB sudah disediakan sarana fisik yaitu bangunan IPAL, namun untuk keseluruhan belum terlihat” (22 November 2020, di rumah Ibu Nona).*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Nona selaku masyarakat pemanfaat, mengenai item ketersediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari penulis menganalisis bahwa sarana fisik program SANIMAS-IDB tersebut sudah tersedia di Kelurahan Lembah Sari.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan, penulis melihat sudah ada sarana program SANIMAS-IDB yaitu bangunan IPAL Komunal beserta mainhole, bak pengontrol yang dibangun dirumah warga, hanya saja saat ini banyak masyarakat yang tidak lagi mau menggunakannya karena sarana tersebut dinilai banyak menimbulkan masalah seperti kebocoran yang menyebabkan bau dan justru akan memperburuk kondisi lingkungan masyarakat pemanfaat.

### **3. Adanya Anggaran Dalam Pelaksanaan Program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari**

Menurut Munandar ( 2007:11) anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang didalamnya berisi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam nilai uang yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.

Ketersediaan dana merupakan unsur penting dalam keberhasilan implementasi program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari karena anggaran dana merupakan penunjang program agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, apabila dana yang tersedia kurang atau terbatas maka implementasi program SANIMAS-IDB akan gagal. Untuk melihat bagaimana anggaran dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB, maka penulis telah melakukan wawancara dengan informan dan key informan, sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Afrizal Zakir selaku PPK program SANIMAS-IDB, menjelaskan bahwa :

*“Untuk anggaran dana program SANIMAS-IDB ini kita dapat bantuan dari Islamic Development Bank atau Bank Pembangunan Islam sebesar Rp 425 juta dan ada juga dana swadaya masyarakat calon pemanfaat IPAL Komunal ” (02 November 2020, di Kantor Dinas Perkrim Kota Pekanbaru).*

Berdasarkan wawancara dengan bapak Afrizal Zakir mengenai item ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB penulis menganalisis bahwa sudah ada anggaran dana program SANIMAS dari IDB sebesar Rp 425 juta untuk satu lokasi pembangunan IPAL Komunal.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nuzul Bahri selaku Ketua KSM Puri Elok menjelaskan bahwa :

*“Program SANIMAS-IDB ini dananya dari Bank Pembangunan Islam atau Bank IDB jumlahnya Rp 425 Juta yang di transfer secara bertahap ke rekening Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)” (30 November 2020, di rumah Bapak Nuzul Bahri ).*

Berdasarkan wawancara penulis mengenai ketersediaan anggaran dana dalam program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa seluruh biaya dari pinjaman IDB yang digunakan untuk pembangunan IPAL Komunal dikirim secara bertahap melalui LKM dengan membuka rekening khusus dana bantuan program SANIMAS-IDB di Bank Umum terdekat atas nama LKM.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mirza selaku Ketua KPP, menjelaskan bahwa :

*“Sumber dana untuk pembangunan IPAL Komunal dari Program SANIMAS-IDB ini dari bantuan Islamic Development Bank dan ada juga dana bantuan dari masyarakat sekitar sebanyak Rp 3 juta dan untuk dana perbulannya masyarakat iuran Rp 3 ribu untuk biaya perawatan IPAL Komunal yang udah disepakati bersama pada awal akan dilaksanakan program ini, tetapi kenyataannya banyak*



*masyarakat yang tidak mau membayar uang iuran tersebut” (14 Desember 2020, di rumah Bapak Mirza).*

Berdasarkan wawancara penulis dengan ketua KPP penulis menganalisis bahwa pembangunan IPAL Komunal di Kelurahan Lembah Sari selain dari bantuan Bank Pembangunan Islam juga dari swadaya masyarakat sebanyak Rp 3 juta.

Berdasarkan hasil observasi mengenai anggaran program SANIMAS-*IDB* sudah ada yang berasal dari bantuan *Islamic Development Bank* sebesar Rp 425 juta yang dikirimkan melalui rekening khusus dana bantuan SANIMAS-*IDB* yang dibuka atas nama LKM dan penyaluran dana dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali, dalam pelaksanaan pembangunan IPAL Komunal pada tahun 2018-2019 di Kelurahan Lembah Sari juga dibantu oleh dana swadaya masyarakat sebanyak Rp 3 juta.

### **c. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Menurut Philips (dalam Masnur Muslich, 2011) karakter merupakan sebuah kumpulan tata nilai perilaku manusia secara keseluruhan baik itu yang berhubungan dengan tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan lingkungannya yang terealisasi melalui pikiran, sikap, perkataan, perasaan, perbuatan yang berdasarkan norma agama, hukum, budaya dan adat istiadat.

Menurut Van Meter dan Van Horn karakteristik organisasi pelaksana baik itu organisasi formal maupun nonformal merupakan pusat perhatian bagi masyarakat, hal ini penting karena sangat berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan yang berkaitan dengan ciri-ciri yang cocok dengan para pelaksana kebijakan tersebut. Jadi karakteristik organisasi pelaksana ini yang menentukan keberhasilan dari implementasi program.

Untuk mengetahui item penilaian dalam indikator karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari,



terdapat dua indikator yang penulis jadikan pertanyaan dalam wawancara untuk selanjutnya penulis analisis dan penulis jabarkan sebagai berikut:

### **1. Adanya Tim Pelayanan Khusus Dalam Pelaksanaan Program SANIMAS- IDB**

Menurut Daft (2003:171) menjelaskan bahwa tim(team) merupakan sebuah unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan berkoordinasi mengenai cara menyelesaikan suatu pekerjaan.

Tersedianya tim pelayanan program yang khusus sangat penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan, tersedianya Tim Khusus yang dibentuk dalam implementasi Program SANIMAS-IDB adalah untuk membantu pemerintah dalam implementasi program agar berjalan secara efektif, maka penulis melakukan wawancara dengan informan dan key informan mengenai program SANIMAS-IDB, sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Afrizal Zakir selaku PPK, menjelaskan bahwa :

*“Tim khusus program SANIMAS-IDB untuk ditingkat Masyarakat itu seperti Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat, Kelompok Penerima dan Pemanfaat dan dibantu juga oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang bertugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat, membantu masyarakat dalam perencanaan dan mendampingi masyarakat dalam pembangunan IPAL Komunal” ( 02 November 2020, di kantor Dinas Perkrim Kota Pekanbaru)*

Berdasarkan wawancara diatas penulis menganalisis bahwa dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari sudah tersedia tim khusus untuk melaksanakan program tersebut di tingkat yang terdiri dari LKM, KSM, KPP serta TFL sebagai pengawas sekaligus pendamping masyarakat dari Dinas Perkrim Kota Pekanbaru.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Lurah Lembah Sari, menjelaskan bahwa :

*“Kalau tim khusus yang dibentuk oleh dinas Perkrim setau saya itu Tenaga Fasilitator Lapangan yang mendampingi masyarakat pada saat pembangunan IPAL Komunal dan pada awal perencanaan program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari, Tim TFL yang meminta izin kepada kelurahan untuk melaksanakan program SANIMAS-IDB disini” (27 Oktober 2020, di Kantor Kelurahan Lembah Sari)*

Berdasarkan wawancara diatas penulis menganalisis bahwa tim TFL sudah melaksanakan tugas mengawasi dan mendampingi masyarakat dilapangan mulai dari proses perencanaan sampai ke pembangunan fisik sarana program SANIMAS-IDB.

Untuk mendapatkan informasi lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mirza selaku Ketua Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara, menjelaskan bahwa :

*“Kami didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan IPAL Komunal, selain itu Tim TFL juga yang menjadi komunikator antara masyarakat dengan pemerintah” (14 Desember 2020, di rumah Bapak Mirza)*

Berdasarkan wawancara mengenai item adanya tim pelayanan khusus dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB penulis menganalisis bahwa selain menjadi pengawas dan pendamping masyarakat dilapangan, TFL juga memiliki tugas sebagai komunikator masyarakat dengan Dinas Perkrim Kota Pekanbaru mengenai pelaksanaan program SANIMAS-IDB.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan secara keseluruhan sudah terlihat adanya tim khusus yang dibentuk untuk melaksanakan program SANIMAS-IDB pada tingkat kelurahan yaitu seperti LKM yang sudah ada di Kelurahan tersebut lalu LKM melalui rebug warga membentuk KSM dan KPP, tim yang sudah dibentuk pada tingkat kelurahan tersebut selanjutnya didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan

hanya saja dalam pelaksanaan tugasnya tim KSM dan KPP belum melakukan tugasnya secara optimal.

## **2. Adanya pembagian Tugas Yang Jelas dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB**

Menurut Rivai (2004:125) menjelaskan bahwa pembagian tugas merupakan hasil analisis yang diperoleh dari pengelolaan informasi sebagai bentuk rangkaian kegiatan didalam suatu pekerjaan.

Kejelasan pembagian tugas dalam program SANIMAS-IDB antara pelaksana dengan Kelompok pemanfaat merupakan suatu ukuran keberhasilan dari implemmentasi suatu kebijakan, apabila pembagian tugas diantara keduanya tidak jelas maka implementasi kebijakan belum berjalan secara efektif, maka penulis telah melakukan wawancara dengan informan dan key informan, sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Afrizal Zakir selaku PPK, menjelaskan bahwa :

*“Pembagian tugas antara kami selaku pelaksana dengan pemanfaat dalam program SANIMAS-IDB sudah ada dan sudah jelas ya kami selaku PPK mempunyai tugas salah satunya mengawasi jalannya program, seperti penyelenggara di tingkat kelurahan juga sudah ada pembagian tugasnya masing-masing seperti KSM yang bertugas menyusun melaksanakan kontruksi dilapangan, kalau pemanfaat nya itu ada Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat atau KPP yang anggotanya juga dari masyarakat yang menggunakan IPAL Komunal, tugasnya mengoperasikan dan memelihara IPAL Komunal”(02 November 2020, di Kantor Dinas Perkrim Kota Pekanbaru)*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Afrizal Zakir mengenai adanya pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan program penulis menganalisis bahwa pembagian tugas antara pelaksana pada tingkat kelurahan yaitu KSM, KPP maupun LKM sudah ada dan sudah disampaikan sejak awal sosialisasi mengenai perencanaan pelaksanaan program SANIMAS-IDB.



Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Nuzul Bahri selaku Ketua KSM, menjelaskan bahwa :

*“Pembagian tugasnya sudah dijelaskan oleh Tim TFL dan Bapak Pejabat Pembuat Komitmen saat pertemuan awal untuk membahas perencanaan program, tugas antara pelaksana Dinas terkait dengan kami selaku KSM sudah ada, saya sendiri selaku KSM mendapat tugas untuk membuat dokumen RKM (Rencana Kerja Masyarakat) juga menyelenggarakan rembuk warga untuk menjelaskan kemajuan dari pelaksanaan kegiatan” (30 November 2020, di rumah Bapak Nuzul Bahri)*

Berdasarkan wawancara diatas penulis menganalisis bahwa tugas dari KSM dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari, salah satunya adalah untuk melakukan penyelenggaraan rembuk warga yang dilakukan secara rutin, untuk membahas perkembangan pelaksanaan program tersebut.

Selanjutnya untuk mendapat informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mirza selaku ketua KPP menjelaskan bahwa :

*“Sudah ada tugasnya masing-masing baik dari tim pelaksana maupun pemanfaat seperti saya sebagai Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara punya tugas seperti mengumpulkan iuran warga setiap bulannya, lalu memelihara IPAL Komunal” (14 Desember 2020, di rumah Bapak Mirza).*

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Ketua KPP diatas penulis menganalisis bahwa dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari, KPP memiliki tugas mengumpulkan uang iuran warga setiap bulannya, untuk biaya operasional pemeliharaan bangunan IPAL Komunal.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan secara keseluruhan mengenai adanya item adanya pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB, dapat dilihat bahwa sudah sudah ada pembagian tugas antara tim pelaksana baik dari Dinas Perkrim Kota Pekanbaru, Tim TFL sampai ke pelaksana di tingkat Kelurahan yaitu LKM, KSM maupun KPP dengan pemanfaat, namun dalam



pelaksanaan tugas pengawasan terhadap KSM dan KPP dari Dinas Perkrim dianggap belum terlaksana secara maksimal.

#### **d. Sikap Para Pelaksana**

Menurut Newcomb (dalam Notoatmodjo, 2005) menjelaskan bahwa sikap merupakan kesiapan seseorang untuk bertindak yang bukan untuk melaksanakan tujuan tertentu, jadi sikap belum disebut tindakan. Menurut Van Meter dan Van Horn Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat seberapa jauh kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kepentingan umum dan pribadi.

Dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari, sikap para pelaksana ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik tersebut, seperti sikap menerima atau menolak pelaksana terhadap kebijakan tersebut yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan dua item dari indikator sikap para pelaksana, yang selanjutnya dianalisis dan penulis dijabarkan sebagai berikut:

##### **1. Adanya pemahaman mengenai tujuan dan manfaat program SANIMAS-*IDB***

Menurut sudijono (2011:50) pemahaman merupakan kemampuan individu dalam memahami sesuatu agar dapat diketahui dan tidak dilupakan, jadi pemahaman adalah suatu proses dalam memahami sesuatu secara mendalam.

Menurut Tommy Suprpto (2009), tujuan merupakan realisasi dari misi yang disusun secara rinci yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tujuan merupakan

suatu keadaan yang diinginkan seseorang atau instansi dan bermaksud untuk merealisasikannya dimasa yang akan datang.

Pemahaman mengenai manfaat dan tujuan dari program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari ini merupakan hal yang penting dalam pengukuran keberhasilan implementasi program baik bagi para pelaksana maupun para penerima manfaat dari pelaksanaan kebijakan. Maka penulis melakukan wawancara dengan informan dan key informan, adalah sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Afrizal Zakir selaku PPK, menjelaskan bahwa:

*“Tujuan program SANIMAS-IDB ini sudah jelas untuk meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat baik secara individu maupun berkelompok serta memberdayakan masyarakat kalau manfaatnya untuk saat ini seperti lingkungan masyarakat tentunya jadi lebih bersih dan sehat serta kebiasaan hidup masyarakat sudah berubah dari yang sebelumnya masih buang air limbah sembarangan saat ini sudah lebih teratur, di atas bangunan IPAL juga bisa dimanfaatkan warga untuk tempat bermain anak-anak sambil belajar membaca, tempat posyandu serta tempat perkumpulan masyarakat dan untuk air limbahnya sendiri sudah jernih dan bersih sehingga tidak mencemari lingkungan juga bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman juga bisa” (02 November 2020, di Kantor Dinas Perkrim Kota Pekanbaru).*

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Afrizal Zakir mengenai item adanya pemahaman tujuan dan manfaat pelaksanaan program SANIMAS-IDB, dapat dianalisis bahwa program SANIMAS-IDB memiliki tujuan dan manfaat yang jelas yaitu untuk memperbaiki lingkungan dan kehidupan masyarakat di Kelurahan Lembah Sari.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dilapangan dengan Bapak Nuzul Bahri selaku ketua KSM menjelaskan bahwa :

*“Pelaksanaan program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari tentunya memiliki tujuan salah satunya untuk menciptakan lingkungan yang sehat, untuk manfaatnya merubah perilaku hidup masyarakat agar lebih sadar mengenai pentingnya kebersihan lingkungan” (30 November 2020, di rumah Bapak Nuzul Bahri).*

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ketua KSM diatas mengenai adanya pemahaman mengenai tujuan dan manfaat program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa salah satu tujuan program SANIMAS-*IDB* adalah untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dan sehat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dilapangan dengan Bapak Mirza selaku ketua KPP, beliau menjelaskan bahwa :

*“Tujuannya sudah pasti untuk memperbaiki akses sanitasi di Kelurahan Lembah Sari dan manfaatnya banyak salah satunya adanya program ini membuat masyarakat saat ini sudah memiliki akses sanitasi yang layak”*(14 Desember 2020, di rumah Bapak Mirza).

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Mirza diatas mengenai item mengenai adanya pemahaman mengenai tujuan dan manfaat program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa sejak adanya program SANIMAS-*IDB* tersebut di Kelurahan Lembah Sari akses sanitasi masyarakat mulai membaik.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Lurah Lembah Sari, mengatakan bahwa :

*“Program ini sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat di kelurahan lembah sari meski lingkungan padat dan kumuh tetapi air limbah bisa tertangani dan terhindar dari penyakit menular akibat lingkungan yang kotor tujuannya program SANIMAS-*IDB* ini untuk memperbaiki sanitasi yang kurang layak disini”* (02 November 2020, di Kantor Kelurahan Lembah Sari)

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Lurah Lembah Sari mengenai item adanya pemahaman mengenai tujuan dan manfaat program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa sejak adanya bantuan program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari tepatnya di Rt 01 Rw 01, saat ini membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat seperti berkurangnya penyakit menular seperti ISPA, Diare, DBD, Tipes dan lainnya, hal tersebut disebabkan oleh lingkungan yang kotor dan tidak sehat akibat dari air limbah rumah tangga yang sebelumnya dibuang sembarangan oleh masyarakat.



Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Joni selaku Ketua Rt 01 Rw 01, yang menjelaskan bahwa :

*“Jelas banyak sekali manfaat dari program SANIMAS-IDB ini salah satunya tentunya masyarakat saat ini sudah tidak mulai memiliki perilaku hidup bersih dan sehat” (22 Novemer 2020, di Rumah Bapak Joni).*

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ketua Rt mengenai item adanya pemahaman mengenai tujuan dan manfaat program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa saat ini masyarakat di Kelurahan Lembah Sari sudah mulai melakukan perilaku hidup sehat dan bersih sejak adanya program SANIMAS-IDB tersebut.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Zamriah selaku pemanfaat program SANIMAS-IDB, menjelaskan bahwa :

*“Untuk manfaat yang saya rasakan memang sejak ada program ini lingkungan jadi lebih sehat, tetapi untuk tujuannya secara umum saya kurang tahu karena saya tidak ada diberitahu mengenai tujuannya secara jelas” (14 Desember 2020, di Rumah Ibu Zamriah).*

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Zamriah mengenai item adanya pemahaman mengenai tujuan dan manfaat program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa tidak semua masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Lembah Sari memahami manfaat dan tujuan dari pelaksanaan program SANIMAS-IDB.

Kemudian untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku masyarakat penerima manfaat, yang menyebutkan bahwa :

*“Yang saya tahu program ini dilaksanakan untuk mengelola air limbah dari rumah masyarakat” (14 Desember 2020, di Rumah Ibu Nurhayati).*



Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Zamriah mengenai item adanya pemahaman mengenai tujuan dan manfaat program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari berfokus untuk menangani air limbah rumah tangga dari rumah masyarakat.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yaitu Bapak Anang Subandi, beliau menjelaskan bahwa:

*“Program ini dilaksanakan untuk memperbaiki sanitasi di rumah masyarakat dengan mengelola air limbah menjadi air yang bersih dan bisa dimanfaatkan kembali oleh masyarakat” (14 Desember 2020, di Rumah Bapak Anang Subandi).*

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Anang Subandi mengenai item adanya pemahaman mengenai tujuan dan manfaat program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa air limbah hasil olahan sarana IPAL Komunal dari program tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sekitar seperti untuk menyiram tanaman, untuk budidaya ikan dan yang lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Nona selaku masyarakat pemanfaat program SANIMAS-*IDB*, menjelaskan bahwa :

*“Sebenarnya sangat banyak manfaat dari program ini ya salah satunya dengan adanya IPAL air limbah jadi bersih lagi dan tidak mencemari lingkungan” (22 November 2020, di Rumah Ibu Nona)*

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Nona mengenai item adanya pemahaman mengenai tujuan dan manfaat program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa air limbah hasil olahan IPAL Komunal apabila disalurkan langsung ke sungai tidak lagi mencemari air sungai.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih banyak penulis melakukan wawancara dengan masyarakat pemanfaat program yaitu Bapak Yono, dijelaskan bahwa :

*“Saya kurang tahu pastinya tujuan dan manfaatnya program ini untuk apa, karena tidak pernah diberi tahu, namun manfaat yang saya sendiri rasakan dengan adanya program ini halaman rumah saya yang awalnya banjir air limbah dari kamar mandi dan cucian piring sekarang sudah tidak tercemar lagi”*(22 November 2020, di Rumah Bapak Yono)

Berdasarkan hasil Observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa untuk pemahaman para pelaksana sudah cukup baik, karena mereka cukup mengerti mengenai tujuan dan manfaat dari program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari hanya saja untuk masyarakat sangat kurang baik karena masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tujuan dan manfaat secara jelas tentang pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pelaksana baik dari pihak Dinas Perkrim maupun KSM dan KPP dengan masyarakat mengenai pentingnya program tersebut.

## **2. Adanya Komitmen dalam Pelaksanaan Program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari**

Menurut Meyer dan Allen (dalam Soekidjan, 2009) menjelaskan bahwa komitmen merupakan penerimaan seseorang terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi dan berusaha untuk bertahan dalam organisasi tersebut.

Komitmen dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari merupakan salah satu unsur penentu apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak, jadi jika ingin implementasi kebijakan SANIMAS-*IDB* ini berhasil maka harus memiliki komitmen yang jelas dalam pelaksanaan kedepannya. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan informan dan key informan yang sudah penulis rangkum sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Afrizal Zakir Ketua Pejabat Pembuat Komitmen Program SANIMAS-*IDB*, menjelaskan bahwa :

*“Untuk komitmen pada program sudah jelas karena program ini merupakan program berkelanjutan, maka dari pelaksana juga akan terus bertanggung jawab melaksanakan program SANIMAS-IDB ini, selanjutnya kami masih merencanakan untuk Kelurahan Lembah Sari di rt yang lain mengenai pembangunan IPAL” ”(02 November 2020, di Kantor Dinas Perkrim Kota Pekanbaru)*

Dari hasil wawancara diatas, penulis menganalisis bahwa program SANIMAS-IDB memiliki komitmen yang cukup jelas di Kelurahan Lembah Sari dengan adanya rencana akan dibangun kembali sarana fisik program tersebut di lokasi lain di Kelurahan Lembah Sari karena masih banyak masyarakat di Rt lain yang belum memiliki akses sanitasi yang layak.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nuzul Bahri Ketua KSM Puri Elok, yang menjelaskan bahwa:

*“Program ini terus berjalan sampai saat ini, tetapi kami selaku penyelenggara hanya memantau saja untuk perawatan KPP yang mengurus, tetapi kemarin sudah ada rencana dari Dinas Perkrim akan membangun IPAL di rt 02 namun terhambat karena corona saat ini”*(30 November 2020, di Rumah Bapak Nuzul).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Ketua KSM diatas mengenai item adanya komitmen dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa perencanaan pembangunan sarana fisik di Rt Rw lain yang ada di Kelurahan Lembah Sari saat ini belum terealisasi akibat pandemi corona.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Mirza selaku ketua KPP, menjelaskan bahwa :

*“Program ini masih terus berjalan di Kelurahan Lembah Sari, kemarin ada rencana pembangunan IPAL di rt 02 namun sepertinya ditunda, dan untuk iuran juga saat ini sudah tidak saya tarik lagi karena kondisi keuangan masyarakat sejak corona semakin menurun jadi sementara dihentikan dulu iurannya”* (14 Desember 2020, di Rumah Bapak Mirza).



Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ketua KPP mengenai item adanya komitmen dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* diatas, penulis menganalisis bahwa tidak hanya rencana pembangunan sarana fisik program SANIMAS-*IDB* yang tertunda iuran perbulan masyarakat untuk operasional pemeliharaan bangunan yang sudah ada juga ikut tertunda akibat pandemik corona yang menyebabkan masyarakat semakin kesulitan ekonominya.

Selanjutnya untuk mendapat informasi yang lebih banyak penulis melakukan wawancara dengan Bapak Lurah Lembah Sari, menjelaskan bahwa:

*“Beberapa bulan yang lalu sudah ada dari pihak TFL yang ke kelurahan untuk merundingkan mengenai pembangunan IPAL lagi di rt lain, namun sekarang sudah tidak pernah lagi datang untuk membicarakan pembangunan tersebut”*(27 Oktober 2020, di Kantor Kelurahan Lembah Sari).

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item adanya komitmen dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa pihak TFL dari Dinas Perkrim Kota Pekanbaru sudah pernah membicarakan perencanaan pembangunan sarana fisik untuk keberlanjutan program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari, namun sampai saat ini belum terealisasikan.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dilapangan dengan Bapak Joni selaku Ketua Rt 01 Rw 01, beliau menjelaskan bahwa :

*“Sejauh ini sepertinya belum ada rencana pembangunan IPAL lagi di Kelurahan Lembah Sari, saya berharapnya Kelurahan ini selalu mendapat bantuan dari program SANIMAS-*IDB* karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki sanitasi yang baik”*(22 November, di Rumah Bapak Joni).

Dari hasil wawancara diatas mengenai item adanya komitmen dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa masih banyak masyarakat di Kelurahan Lembah Sari belum memiliki akses sanitasi layak, yang tidak mendapatkan



bantuan program SANIMAS-*IDB* hal tersebut terjadi karena tidak meratanya pembangunan sarana tersebut.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Zamriah selaku masyarakat pemanfaat, menjelaskan bahwa :

*“Program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari ya baru ini, untuk pembangunan selanjutnya saya belum ada dengar apakah akan dapat bantuan lagi atau tidak, karena sudah lama tidak ada pembahasan mengenai perencanaan program itu disini”*(14 Desember 2020, di Rumah Ibu Zamriah).

Dari hasil wawancara diatas mengenai item adanya komitmen dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*., penulis menganalisis bahwa komitmen keberlanjutan pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari belum terlihat oleh beberapa masyarakat di sekitar Kelurahan tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui informasi yang lebih banyak penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nurhayati selaku masyarakat, mengatakan bahwa :

*“Komitmennya menurut saya kurang berjalan ya terutama pelaksana nya seperti KPP, kemarin sambungan pipa dirumah saya bocor tidak kunjung diperbaiki, dahulu awal dibangun jika ada kerusakan sedikit sudah langsung diperbaiki, sekarang tidak lagi sepertinya sejak tidak ada iuran perbulan”*(14 Desember 2020, di Rumah Ibu Nurhayati).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati diatas mengenai item adanya komitmen dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa komitmen KPP untuk pelaksanaan tugasnya dalam perawatan bangunan IPAL Komunal dinilai kurang optimal.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yono selaku masyarakat pemanfaat, menjelaskan bahwa :

*“Saya berharap ya pelaksana program lebih berkomitmen dan bertanggung jawablah dalam melaksanakan program ini, soalnya masih banyak masalah dari IPAL yang tidak kunjung diselesaikan oleh pelaksana”*(22 November 2020, di rumah bapak Yono).

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Yono dilapangan mengenai item adanya komitmen dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari dinilai kurang maksimal.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Nona selaku masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Lembah Sari, beliau mengatakan bahwa :

*“Saya tidak tau komitmen dari program ini seperti apa karena memang belum ada yang memberi tahu kelanjutannya bagaimana”*(22 November 2020, di Rumah Ibu Nona).

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Nona selaku masyarakat pemanfaat program mengenai item adanya komitmen dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa belum ada pembahasan dari pihak pusat mengenai keberlanjutan program SANIMAS-*IDB*.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Anang Subandi selaku masyarakat pemanfaat program SANIMAS-*IDB*, mengatakan bahwa:

*“Awal dilaksanakannya program SANIMAS-*IDB* disini, yang saya liat ya setiap bulan KPP selalu membersihkan bangunan IPAL dan memungut uang iuran ke kami perbulannya rp 3 ribu, tapi sekarang sudah tidak ada lagi”*(14 Desember 2020, di Rumah Bapak Anang Subandi).

Dari hasil wawancara diatas mengenai item adanya komitmen dalam pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa komitmen dari pihak pelaksana Kelurahan yaitu KPP dinilai kurang optimal karena bangunan IPAL Komunal dibiarkan terbengkalai tidak terurus lagi.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, komitmen dari pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* sudah ada seperti adanya sosialisasi mengenai rencana Dinas Perkrim Kota Pekanbaru dengan penyelenggara tingkat Kelurahan yang akan melakukan pembangunan IPAL lagi di rt

lain di Kelurahan Lembah Sari, hanya saja itu belum terlaksana akibat pandemi covid-19 saat ini pemerintah lebih fokus untuk mengurus masalah corona.

**e. Komunikasi Antar Pelaksana**

Menurut Effendy (2003:13) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan dengan cara yang tepat mengenai informasi berupa opini dan sikap.

Menurut Rogers dan Kincaid (2005:19) komunikasi merupakan proses antara dua orang atau lebih yang melakukan pertukaran informasi antara satu dengan yang lainnya agar dapat dipahami secara mendalam.

Menurut Van Meter dan Van Horn komunikasi antar organisasi yaitu apa yang menjadi standar dan tujuan yang harus dipahami dengan jelas oleh para pelaksana. Komunikasi kebijakan merupakan tahap penyampaian informasi mengenai standar pelaksanaan kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sedangkan komunikasi organisasi merupakan komunikasi yang terjadi antara manusia satu dengan yang lain yang termasuk di dalam organisasi. Dalam hal ini untuk melihat komunikasi antar pelaksana penulis merangkum dalam beberapa item penilaian, sebagai berikut:

**1. Adanya Sosialisasi dalam Pelaksanaan Program SANIMAS-IDB**

Menurut Maclever (2013:175) sosialisasi merupakan suatu proses mempelajari norma, nilai, peran dan sikap yang digunakan dalam kehidupan sosial. Sosialisasi dalam arti luas merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu sejak lahir hingga akhir hayatnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam keberhasilan implementasi program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari sangat diperlukan adanya sosialisasi, sosialisasi merupakan tahap penanaman kebiasaan atau aturan dari satu kelompok ke kelompok lainnya seperti dari



pemerintah ke masyarakat, dengan adanya sosialisasi dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB maka pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan semestinya baik dari pelaksana maupun dari masyarakat yang berpartisipasi dalam implementasi program tersebut. Untuk melihat sosialisasi penulis melakukan wawancara dengan informan dan key informan, sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Afrizal Zakir selaku Pejabat Pembuat Komitmen, menjelaskan bahwa :

*“Sudah dilakukan sosialisasi dalam pelaksana program dengan mengumpulkan seluruh Camat, Lurah dan LKM di Kota Pekanbaru yang dilaksanakan sejak awal perencanaan program SANIMAS-IDB, untuk menjelaskan bagaimana arah kebijakan, strategi dari program ini, tujuan dan manfaat program, kriteria lokasi penerima bantuan, pembentukan KSM, KPP dan selanjutnya Camat, Lurah dan LKM yang akan mensosialisasikan kepada pelaksana ditingkat masyarakat yaitu KSM, KPP dan juga kepada masyarakat calon pemanfaat program” (02 November 2020, di Kantor Dinas Perkrim Kota Pekanbaru).*

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item adanya sosialisasi dalam Pelaksanaan Program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa sosialisasi di Kota Pekanbaru sudah dilakukan mulai dari tingkat pusat maupun ditingkat Kelurahan sejak awal perencanaan program.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nuzul Bahri selaku Ketua KSM, menjelaskan bahwa :

*“Sudah dilakukan sosialisasi kepada kami oleh LKM pada awal akan dilaksanakannya program ini di tahun 2018 mengenai manfaat dan tujuan program serta tahapan pelaksanaan pembangunan IPAL dan kami juga sudah menyelenggarakan rebug warga sejak agustus 2018 untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai manfaat dan tujuan dari program SANIMAS-IDB” (30 November 2020, di Rumah Bapak Nuzul Bahri).*

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Nuzul Bahri mengenai adanya sosialisasi mengenai pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa



sosialisasi mengenai manfaat dan tujuan program, kepada masyarakat dilakukan secara rembug warga yang dimulai pada bulan agustus tahun 2018.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi penulis dengan Bapak Lurah Lembah Sari, mengatakan bahwa:

*“Seingat saya sosialisasi dilakukan sejak 2018 kepada masyarakat calon penerima program dengan sistem rembug warga yang dipimpin oleh LKM dan dihadiri oleh TFL untuk membahas tujuan, prinsip serta mekanisme pelaksanaan program tetapi seharusnya pihak Dinas Perkrim juga berkontribusi dengan Dinas lain seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup mengenai program ini agar masyarakat lebih mudah mengerti tujuan dan manfaat program tersebut” (27 Oktober 2020, di Kantor Kelurahan Lembah Sari).*

Dari hasil wawancara penulis diatas dengan Bapak Lurah Lembah Sari mengenai item sosialisasi dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa proses sosialisasi dipimpin oleh LKM dan dihadiri oleh TFL yang membahas mengenai mekanisme pelaksanaan program, namun dalam proses sosialisasi di tingkat Kelurahan tidak ada dihadiri oleh ketua PPK dari Dinas Perkrim Kota Pekanbaru.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih banyak penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mirza selaku ketua KPP, mengatakan bahwa:

*“Sudah berulang kali diadakan sosialisasi kepada masyarakat baik untuk yang laki-laki maupun perempuan di aula kantor lurah lembah sari untuk membahas mengenai tahap-tahap pembangunan sarana fisik program SANIMAS-IDB” (14 Desember 2020, di Rumah Bapak Mirza).*

Dari hasil wawancara penulis diatas dengan Bapak Ketua KPP mengenai item adanya sosialisasi dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa sosialisasi yang dilaksanakan secara rembug warga dihadiri oleh masyarakat di Rt 01 Rw 01 baik yang laki-laki maupun perempuan, sosialisasi tersebut membahas mengenai tahapan pelaksanaan pembangunan IPAL Komunal.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penulis melakukan wawancara dengan Bapak Joni selaku Ketua Rt 01 Rw 01 Kelurahan Lembah Sari, yang menjelaskan bahwa:

*“Memang ada sosialisasi dari pihak pelaksana yaitu LKM, KSM dan dihadiri oleh TFL di tahun 2018 mengenai program SANIMAS-IDB ini” (22 November 2020, di Rumah Bapak Joni).*

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Ketua Rt diatas mengenai item adanya sosialisasi pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa sosialisasi yang dilaksanakan pada tahun 2018 diselenggarakan oleh pihak LKM serta KSM dan dihadiri oleh TFL.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Zamriah selaku masyarakat pemanfaat program, menjelaskan bahwa:

*“Saya tidak tahu seperti apa sosialisasinya karena saya tidak pernah ikut sosialisasi mengenai program SANIMAS-IDB disini” (14 Desember 2020, di Rumah Ibu Zamriah).*

Dari hasil wawancara penulis diatas dengan Ibu Zamriah mengenai adanya sosialisasi pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa sosialisasi mengenai program SANIMAS-IDB yang dilakukan di Kelurahan Lembah Sari belum dilakukan secara optimal karena masih banyak masyarakat yang tidak ikut dalam proses sosialisasi tersebut.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Nurhayati selaku masyarakat penerima manfaat, mengatakan bahwa:

*“Tidak tau saya seperti apa pastinya proses sosialisasinya, karena saya tidak diberi tahu kalau ada tahap sosialisasinya, yang saya tahu hanya pada saat pembangunan IPAL saja” (22 November 2020, di Rumah Ibu Nurhayati).*

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurhayati selaku masyarakat pemanfaat program mengenai item adanya sosialisasi pelaksanaan program SANIMAS-IDB,

penulis menganalisis bahwa sebagian masyarakat yang mendapatkan bantuan program SANIMAS-*IDB* hanya mengetahui mengenai pembangunan sarana fisik IPAL Komunal dan tidak mengerti mengenai mekanisme pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yono selaku masyarakat pemanfaat, yang mengatakan bahwa:

*“Setau saya memang pernah ada sosialisasi, tetapi tidak semua warga yang diundang untuk datang ke aula kantor lurah, jadi tidak semua yang tau mengenai tahapan program tersebut”*(22 November 2020, di Rumah Bapak Yono).

Dari hasil wawancara penulis diatas dengan Bapak Yono mengenai adanya sosialisasi pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis dapat menganalisis bahwa tidak semua masyarakat yang mendapatkan bantuan program SANIMAS-*IDB* diundang untuk hadir dalam acara rembung warga di Kelurahan Lembah Sari, akibatnya masih banyak masyarakat yang tidak mengerti mengenai program SANIMAS-*IDB* tersebut.

Menurut wawancara penulis dengan Anang Subandi selaku masyarakat, menjelaskan bahwa:

*“Saya pernah ikut sosialisasi di tahun 2018 tetapi hanya sekali, selanjutnya saya tidak pernah ikut sosialisasi lagi”*(14 Desember 2020, di Rumah Bapak Anang Subandi).

Dari hasil wawancara diatas dengan Bapak Anang Subandi mengenai adanya sosialisasi pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis dapat menganalisis bahwa rembung warga yang dilakukan dalam proses sosialisasi program dilakukan secara bertahap mulai dari awal perencanaan sampai ke selesai proses pembangunan sarana IPAL Komunal.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nona selaku masyarakat pemanfaat, menjelaskan bahwa:

*“Saya pernah ikut sosialisasi rembung yang tahap perempuan, tetapi cuma membahas pembangunan IPAL nya saja tidak ada pembahasan mengenai dana*



*anggaran program, seharusnya juga ada Dinas Kesehatan juga yang ikut memberikan sosialisasi ya agar kami juga lebih mengerti manfaatnya untuk lingkungan dan kesehatan kami”(22 November 2020, di Rumah Ibu Nona).*

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Nona diatas mengenai adanya sosialisasi pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis dapat menganalisis bahwa proses sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana program belum berjalan secara maksimal, karena tidak ada menjelaskan secara rinci mengenai anggaran dana dalam program tersebut dan tidak ada pihak Dinas Perkrim maupun Dinas Kesehatan untuk membantu proses sosialisasi program, agar masyarakat lebih paham mengenai pentingnya program tersebut

Berdasarkan hasil observasi penulis, penulis melihat bahwa proses sosialisasi sudah pernah dilakukan pada tahun 2018 baik ditingkat Kabupaten atau Kota maupun di tingkat masyarakat yang dilakukan oleh pihak Dinas Perkrim kepada Camat, Lurah, LKM dan TFL maupun KSM, namun pada pelaksanaan sosialisasi pada tingkat masyarakat dinilai kurang optimal karena hanya beberapa masyarakat yang ikut dalam rebug warga tersebut dan hanya membahas mengenai pelaksanaan fisik program saja tidak membahas mengenai mekanisme pendanaan bantuan *IDB* secara detail, akibat kurangnya masyarakat yang ikut sosialisasi banyak yang belum mengetahui mengenai proses pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* mulai dari perencanaan, pendanaan, manfaat dan tujuan secara jelas tetapi hanya mengetahui pada saat gotong royong dalam pembangunan fisik IPAL Komunal saja serta masyarakat tidak mengetahui dari mana bantuan dana pembangunan IPAL Komunal dan masyarakat menganggap pelaksana kurang terbuka dalam pelaksanaan program.



## 2. Adanya Koordinasi Antara Pihak Pelaksana Program SANIMAS-IDB

Menurut Handoko (2003:195) menjelaskan bahwa koordinasi merupakan sebuah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan yang ada pada masing-masing bagian dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Koordinasi dalam program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari merupakan salah satu unsur yang dibutuhkan dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan, koordinasi merupakan yang dilakukan oleh banyak pihak dari suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama sesuai dengan perencanaan. Dalam hal ini untuk melihat koordinasi program SANIMAS-IDB penulis melakukan wawancara dengan informan dan key informan, sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dilapangan dengan Bapak Afrizal Zakir selaku PPK, menjelaskan bahwa:

*“Koordinasi pelaksana baik dari Dinas Perkrim dengan TFL maupun masyarakat pada tingkat kelurahan sudah ada ya, bisa dilihat dari awal tahap perencanaan sampai ke pembangunan sarana fisik yang dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat, serta koordinasi antara KSM,KPP dengan tim TFL lalu Tim TFL yang menyambungkan kepada pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan program di Kelurahan Lembah Sari”(02 November 2020, di Kantor Dinas Perkrim di Kota Pekanbaru).*

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item adanya koordinasi mengenai pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis dapat menganalisis bahwa sudah ada koordinasi antara pihak pelaksana program SANIMAS-IDB baik ditingkat pusat maupun di tingkat Kelurahan.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi lebih banyak penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nuzul Bahri sebagai Ketua KSM, mengatakan bahwa:

*“ Koordinasi antara pihak kami dengan masyarakat sudah ada sejak awal pelaksanaan pembangunan IPAL karena memang program ini setiap tahapnya memerlukan kerjasama yang baik antara pelaksana dengan masyarakat selaku pemanfaat, kami juga selalu berkoordinasi mengenai perkembangan*

*pembangunan ini sama TFL biar dari Tim TFL yang menyampaikan ke dinas”(30 November 2020, di Rumah Bapak Nuzul Bahri).*

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item adanya koordinasi mengenai pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa koordinasi pelaksana dengan masyarakat Kelurahan Lembah Sari sudah berjalan sejak awal akan dilaksanakan program tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Mirza selaku Ketua KPP, mengatakan bahwa:

*“Jelas adalah koordinasi antara kami, koordinasi antara KSM, KPP, TFL dengan masyarakat, kalau tidak ada mungkin tidak berjalan ini programnya”(14 Desember 2020, di Rumah Bapak Mirza).*

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dilapangan dengan Bapak Iif selaku Lurah Lembah Sari, beliau mengatakan bahwa:

*“Saya lihat sudah cukup baik koordinasinya antara pelaksana program SANIMAS-*IDB*”(27 Oktober 2020, di Kantor Kelurahan Lembah Sari).*

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Lurah Lembah Sari diatas mengenai item adanya koordinasi mengenai pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa koordinasi antar pelaksana program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari sudah terlihat cukup baik.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Joni selaku Ketua Rt 01 Rw 01, yang mengatakan bahwa:

*“Kalau koordinasinya antara pelaksana yang satu dengan yang lain maupun dengan masyarakat sudah cukup baik”(22 November 2020, di Rumah Bapak Joni).*

Dari hasil wawancara diatas mengenai item adanya koordinasi mengenai pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa sudah ada

koordinasi antar pelaksana yaitu LKM, KSM, KPP dan TFL dalam pembangunan sarana program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan masyarakat pemanfaat program yaitu Ibu Zamriah, menjelaskan bahwa:

*“Menurut saya koordinasi antara pihak Dinas Perkrim dengan TFL saat ini kurang terlihat, karena banyak permasalahan sejak awal pelaksanaan program yang tidak kunjung diperbaiki oleh Dinas Perkrim, mereka tidak turun langsung kelapangan hanya menunggu tim TFL tetapi tidak juga selesai permasalahan disini”*(14 Desember 2020, di Rumah Ibu Zamriah).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Zamriah diatas mengenai item adanya koordinasi mengenai pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa menurut masyarakat penerima program SANIMAS-*IDB* koordinasi pelaksana program di tingkat Kelurahan dengan pihak Dinas Perkrim dinilai kurang optimal.

Kemudian berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Nurhayati selaku masyarakat penerima bantuan program SANIMAS-*IDB*, menjelaskan bahwa:

*“Untuk koordinasinya menurut saya belum cukup baik, karena hanya dari pihak TFL saja yang sering memberi arahan dan membantu kami dalam pembangunan IPAL Komunal, sedangkan Dinas Perkrim sudah tidak ada tanggung jawabnya lagi”*(22 November 2020, di Rumah Ibu Nurhayati).

Dari hasil wawancara penulis mengenai item adanya koordinasi mengenai pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa koordinasi pelaksana Kelurahan dengan pihak Dinas Perkrim Kota Pekanbaru kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari pada tahap sosialisasi dinilai kurang optimal.

Berdasarkan wawancara penulis dilapangan dengan Bapak Yono selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

*“Menurut saya untuk koordinasi antara pelaksana kurang baik ya, dari awal disini sudah ditolak warga karena kurang setuju dengan pemilihan sarananya dan kami minta yang lain selain IPAL, kami sampaikan ke TFL agar disampaikan ke Dinas Perkrim, tapi dari Dinas Perkrim tidak ada tanggapan”*(22 November 2020, di Rumah Bapak Yono).



Dari hasil wawancara diatas Bersama Bapak Yono mengenai item adanya koordinasi mengenai pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis dapat menganalisis bahwa masyarakat menilai koordinasi antara TFL dengan PPK Dinas Perkrim Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik.

Kemudian untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Anang Subandi selaku masyarakat, menjelaskan bahwa:

*“Memang sudah ada koordinasi antara pelaksana dengan masyarakat namun dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan baik”*(14 Desember 2020, di Rumah Bapak Anang Subandi).

Dari hasil wawancara diatas mengenai item adanya koordinasi mengenai pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa koordinasi dalam pelaksanaan memang sudah ada namun belum berjalan secara efektif.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Nona selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

*“Untuk koordinasi antara pelaksana dengan masyarakat menurut saya belum cukup baik ya, hal itu mungkin disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara pelaksana kepada masyarakat ”*(22 November 2020, di Rumah Ibu Nona).

Berdasarkan hasil observasi penulis dapat disimpulkan bahwa koordinasi antara pelaksana yaitu Pejabat Pembuat Komitmen Program SANIMAS-*IDB* Dinas Perkrim Kota Pekanbaru dengan pelaksana pada tingkat Kelurahan yaitu LKM, KSM dan KPP serta pendamping masyarakat yaitu TFL dalam koordinasi antar pelaksana dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, karena sejak awal pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* PPK program SANIMAS-*IDB* dari Dinas Perkrim Kota Pekanbaru tidak turun langsung kelapangan untuk memantau perkembangan program tersebut, sehingga masih banyak masalah yang terjadi di masyarakat Kelurahan Lembah Sari mengenai adanya program SANIMAS-*IDB* yang tidak kunjung terselesaikan.



#### **f. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik**

Menurut Purba (2002) menjelaskan bahwa lingkungan social merupakan daerah yang menjadi tempat terjadinya interaksi sosial antara beberapa kelompok yang berkaitan dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan sesuai dengan nilai serta norma yang telah ditetapkan. Menurut Soekartawi (dalam Ardianto Farhani, 2009) Lingkungan ekonomi merupakan kondisi ekonomi yang terjadi di suatu daerah yang berkaitan dengan pendapatan atau pemasukan seseorang di daerah tersebut. Sedangkan lingkungan politik merupakan hukum, instansi pemerintah serta kelompok yang mempengaruhi seseorang dan kelompok organisasi dalam masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn hal terakhir yang merupakan unsur mendorong keberhasilan dan kinerja dari implementasi suatu kebijakan adalah lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan program, sejauh mana kelompok kepentingan memberikan dukungannya, serta karakteristik partisipan yaitu menerima atau menolak. Jadi apabila lingkungan sosial, ekonomi dan politik tidak kondusif akan menyebabkan kegagalan bagi kinerja implementasi kebijakan, karena dalam pelaksanaan kebijakan harus melihat kekondusifan dari lingkungan eksternal. Dalam hal untuk mengetahui lingkungan sosial, ekonomi dan politik ini dapat dilihat melalui beberapa item penilaian, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Dukungan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik dalam Implementasi Program SANIMAS-IDB**

Menurut Dalyono (dalam Basrowi dan Siti Juariyah, 2010) yang menjelaskan bahwa kondisi sosial merupakan semua individu atau kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain baik secara langsung seperti pergaulan sehari-hari baik

dari keluarga, teman, tetangga maupun secara tidak langsung seperti melalui media sosial.

Kondisi ekonomi menurut Sumardi dan Evers (dalam Basrowi dan Siti Juariyah, 2010) adalah suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan individu pada posisi tertentu didalam masyarakat, yang dapat dinilai secara subjektif melalui kondisi tempat tinggal, lingkungan tempat tinggal, pekerjaan serta pendapatan seseorang.

Dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari dukungan lingkungan sosial, ekonomi dan politik atau lingkungan eksternal menjadi salah satu unsur yang mendorong keberhasilan implementasi kebijakan, lingkungan eksternal ini meliputi bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kondisi sosial di masyarakat, lalu apakah sumber daya ekonomi masyarakat mencukupi dalam pelaksanaan program serta apakah ada dukungan dari para elite politik di daerah tersebut mengenai program yang dilaksanakan. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan informan dan key informan, sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Afrizal Zakir selaku PPK program, menjelaskan bahwa:

*“Program ini memang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat karena itu masyarakat selalu dilibatkan dalam pembahasan mengenai pelaksanaan program agar apa yang disetujui itulah yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial ekonominya, kalau mengenai dukungan dari politik menurut saya pasti didukung ya karena ini kan program bagus untuk masyarakat”*(02 November 2020, di Kantor Dinas Perkrim Kota Pekanbaru).

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item dukungan lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa pelaksanaan program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari dilaksanakan

berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta mendapatkan dukungan dari elit politik yang ada di daerah tersebut.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Lurah Lembah Sari ,menjelaskan bahwa:

*“Mengenai kondisi ekonomi sudah diperhatikan karena masyarakat disini memang mayoritas berpenghasilan rendah,namun untuk lingkungan sosial masyarakat kami perlu program ini untuk dilaksanakan lagi di daerah lain agar terjadi pemerataan dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB di Kelurahan Lembah Sari, kalau politik memang pernah ada calon legislatif yang mencoba mempolitisasikan namun kami tolak”(27 Oktober 2020, di Kantor Kelurahan Lembah Sari).*

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item dukungan lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa pelaksanaan program ini tidak mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di Kelurahan Lembah Sari serta tidak ada dukungan dari elit politik di daerah tersebut.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nuzul Bahri selaku ketua KSM, mengatakan bahwa:

*“Kondisi sosial masyarakat tentunya dengan adanya program ini banyak menimbulkan kecemburuan ya masalahnya rt lain yang sama-sama belum memiliki akses sanitasi yang layak di kelurahan lembah sari banyak yang belum mendapatkan bantuan program ini, sedangkan untuk kondisi ekonomi di masyarakat menurut saya aman saja karna ini program kan biayanya dari bantuan IDB jadi tidak memberatkan masyarakat, untuk politik sejauh ini belum ada anggota DPR atau pejabat-pejabat yang merespon mengenai program ini”(30 November 2020, di Rumah Bapak Nuzul Bahri).*

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item dukungan lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa program SANIMAS-IDB tidak memberatkan kondisi ekonomi masyarakat karena biaya dari pelaksanaan program tersebut dari dana bantuan IDB .

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Mirza selaku Ketua KPP, menjelaskan bahwa:



*“Saya rasa kondisi ekonomi dan sosial masyarakat mendukung program ini karena kan ini program tidak memberatkan keuangan masyarakat hanya saja memang belum berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat karena rencana pada awalnya air hasil pengelolaan limbah akan kami pergunakan untuk budidaya ikan lalu dijual untuk pemasukan kelurahan namun terkendala karena pandemi, kalau dukungan dari politik disini ada juga anggota DPRD ya dia mendukung program ini namun tidak terlalu ikut campur hanya sekedar dukungan saja” (14 Desember 2020, di Rumah Bapak Mirza).*

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item dukungan lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa dukungan elit politik yang ada di Kelurahan Lembah Sari belum optimal.

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Bapak Joni selaku ketua Rt 01 Rw 01, menjelaskan bahwa:

*“Pelaksanaan program ini tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, tidak ada dukungan politik disini” (22 November 2020, di Rumah Bapak Joni).*

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item dukungan lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa dukungan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sudah ada namun belum maksimal.

Dari wawancara penulis dengan masyarakat pemanfaat yaitu Ibu Zamriah, menjelaskan bahwa:

*“Menurut saya untuk lingkungan sosialnya program ini belum merata justru banyak masyarakat yang lebih membutuhkan bantuan program ini malah tidak dapat, ekonomi masyarakat juga kurang mendukung karena perbulan harus membayar uang iuran ya walaupun rp 3 ribu tapi disini banyak masyarakat yang untuk makan saja susah, kalau politik saya kurang tau” (14 Desember 2020, di Rumah Ibu Zamriah).*

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item dukungan lingkungan sosial, ekonomi dan politik dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis



bahwa dalam hal kondisi ekonomi, penghasilan masyarakat tidak cukup untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Menurut Ibu Nurhayati selaku masyarakat berdasarkan wawancara penulis, mengatakan bahwa:

*“Saya kurang mengerti mengenai dukungan lingkungan sosial, politik dan ekonomi masyarakat mengenai program ini”*(22 November 2020, di Rumah Ibu Nurhayati).

Dari wawancara penulis dengan Bapak Anang Subandi selaku masyarakat, menjelaskan bahwa:

*“Program ini cukup memberikan pengaruh bagi lingkungan sosial masyarakat jadi masyarakat lebih dekat karena sering gotong royong, untuk ekonominya belum berpengaruh karena program tersebut tidak jadi dijalankan sesuai rencana awal seperti akan budidaya ikan dari air limbah tetapi tidak terlaksana, dukungan politik saya rasa tidak ada”*(14 Desember 2020, di Rumah Bapak Anang Subandi).

Menurut Bapak Yono selaku masyarakat berdasarkan wawancara penulis, mengatakan bahwa:

*“Saya tidak merasa ada dukungan ekonomi dan politik dari program ini hanya berpengaruh dalam lingkungan sosial saja”*(22 November 2020, di Rumah Bapak Yono).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Nona selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

*“Tidak ada dukungan dari politik walaupun disini ada anggota DPRD, kalau sosial dan ekonomi mungkin cukup mendukung”*(22 November 2020, di Rumah Ibu Nona).

Berdasarkan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa implementasi program SANIMAS-IDB cukup mempengaruhi kondisi sosial masyarakat seperti dalam pelaksanaan program selalu melibatkan masyarakat seperti adanya gotong royong dalam pembangunan IPAL Komunal, untuk ekonominya program tersebut dilaksanakan menggunakan dana dari IDB bukan dari masyarakat seutuhnya jadi tidak memberatkan

masyarakat namun program tersebut belum bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan rencana awalnya, dan tidak ada dukungan politik dalam implementasi program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari. Namun berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan program SANIMAS-*IDB* untuk lingkungan sosial dan ekonomi kurang diperhatikan karena masih banyak masyarakat yang kondisi sanitasinya lebih memprihatinkan justru tidak mendapatkan bantuan program tersebut.

## **2. Adanya Tanggapan Masyarakat Mengenai Pelaksanaan Program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari**

Menurut Ahmadi (dalam Liana Noor Fadillah, 2017) menjelaskan bahwa tanggapan merupakan salah satu fungsi jiwa yang utama, dapat dikatakan sebuah ingatan yang diperoleh dari proses pengamatan, jadi jika proses pengamatan tersebut selesai maka hanya ada kesan-kesannya saja.

Tanggapan masyarakat merupakan hal yang berkaitan dengan pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* yang dilaksanakan di Kelurahan Lembah Sari berkaitan dengan reaksi masyarakat mendukung atau malah menolak pelaksanaan program tersebut. Untuk melihat tanggapan masyarakat di Kelurahan Lembah Sari penulis melakukan wawancara dengan informan dan key informan, sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Afrizal Zakir selaku PPK, mengatakan bahwa:

*“Pada awal akan dilaksanakannya program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari sempat terjadi penolakan dari masyarakat karena ya banyak masyarakat yang berpendidikan rendah sehingga kurangnya pengetahuan mengenai manfaat program ini, namun sejak merasakan sendiri manfaatnya saat ini justru program SANIMAS-*IDB* jadi dambaan masyarakat”*(02 November 2020, di Kantor Dinas Perkrim Kota Pekanbaru).

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item adanya tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa

tanggapan publik sekitar mengenai penyelenggaraan program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari sempat terjadi penolakan pada awal tahap perencanaan.

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Bapak iif selaku Lurah Lembah Sari, menjelaskan bahwa:

*“Saya sendiri sangat mendukung pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari dan saya kira masyarakat juga mendukung adanya program ini, karena masyarakat sangat membutuhkan sanitasi yang baik agar bisa mewujudkan mimpinya untuk hidup dilingkungan yang bersih, namun saya berharap lebih banyak masyarakat yang di beri bantuan program karna masih banyak yang belum memiliki sanitasi yang baik”*(27 Oktober 2020, di Kantor Kelurahan Lembah Sari).

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item adanya tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa untuk saat ini program SANIMAS-*IDB* sangat diminati oleh masyarakat karena sudah banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sejak adanya program tersebut, terutama dalam pengelolaan air limbah rumah tangga.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak penulis melakukan wawancara dengan Bapak Nuzul Bahri selaku Ketua KSM, menjelaskan bahwa:

*“Masyarakat saat ini sangat mendukung program ini ya, malah banyak yang berharap kalau program SANIMAS-*IDB* ini dilaksanakan di setiap rt rw di Kelurahan Lembah Sari”*(30 November 2020, di Rumah Bapak Nuzul Bahri).

Dari hasil wawancara diatas mengenai mengenai item adanya tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari dapat dikatakan belum dilaksanakan secara merata sementara di Kelurahan tersebut memiliki 14 Rw tetapi hanya Rw 01 saja yang mendapat bantuan pembangunan IPAL Komunal, sementara masih banyak masyarakat di Rw lain yang belum memiliki sanitasi yang layak mengharapkan program tersebut dilaksanakan secara keseluruhan.



Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Bapak Mirza selaku Ketua KPP, mengatakan bahwa:

*“Sempat ada penolakan waktu awal pelaksanaan, karena mereka taunya didaerah lain yang sudah melaksanakan program ini banyak yang gagal seperti pipa sambungan banyak yang bocor, yang malah menyebabkan banjir, tetapi sekarang tidak lagi” (30 November 2020, di Rumah Bapak Mirza).*

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item adanya tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa banyak masyarakat yang kurang tertarik terkait dengan sarana yang dipilih dalam pelaksanaan program SANIMAS-IDB yaitu IPAL Komunal karena dinilai banyak menimbulkan masalah seperti kebocoran yang terjadi di Kelurahan lain yang sudah terlebih dahulu mendapatkan bantuan program.

Selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Joni selaku Ketua Rt 01 Rw 01, menjelaskan bahwa:

*“Saya sendiri sangat mendukung adanya program ini, masyarakat juga begitu” (22 November 2020, di Rumah Bapak Joni).*

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item adanya tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa program ini cukup diminati oleh masyarakat di Kelurahan Lembah Sari karena dapat merubah lingkungan yang kumuh menjadi sehat dan bersih.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Zamriah selaku masyarakat, menyebutkan bahwa:

*“Ya saya mendukung program ini karena memang program ini sudah banyak manfaatnya bagi masyarakat” (14 Desember 2020, di Rumah Ibu Zamriah).*

Dari hasil wawancara penulis diatas dengan Ibu Zamriah mengenai item adanya tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa banyak masyarakat penerima program SANIMAS-IDB di



Kelurahan Lembah Sari yang menunjukkan sikap menerima dan mendukung adanya pelaksanaan program tersebut.

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurhayati selaku masyarakat pemanfaat, mengatakan bahwa:

*“Awalnya saya menolak program ini, karena setau saya program ini banyak permasalahannya, kalau sekarang ya menerima karena memang sudah terbantu sanitasi saya, tapi masih kurang baik ya”*(22 November 2020, di Rumah Ibu Nurhayati).

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item adanya tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa selama pemanfaatan sarana IPAL Komunal oleh masyarakat Lembah Sari sudah banyak membantu masyarakat untuk mendapatkan akses sanitasi yang layak dan perlahan mulai mewujudkan mimpi mereka untuk memiliki lingkungan yang sehat dan bersih.

Menurut Bapak Yono dalam wawancara penulis selaku masyarakat, mengatakan bahwa:

*“Kalau masyarakat ada yang menerima tetapi juga masih banyak yang menolak ya karena takut malah nanti terjadi kebocoran dari IPAL itu malah semakin buruk kondisi lingkungannya”*(22 November 2020, di Rumah Bapak Yono).

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item adanya tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan program SANIMAS-IDB, penulis menganalisis bahwa banyak masyarakat yang masih menolak program tersebut dikarenakan masyarakat menganggap pemilihan sarana fisik program SANIMAS-IDB yaitu IPAL Komunal kurang tepat.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Anang Subandi selaku masyarakat, menjelaskan bahwa:

*“Dulu sempat heboh ya masyarakat menolak program ini, kalau sekarang sudah tidak”*(14 Desember 2020, di Rumah Bapak Anang Subandi).

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item adanya tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa masyarakat Kelurahan Lembah Sari perlahan menerima program SANIMAS-*IDB* dengan baik dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Nona selaku masyarakat, menjelaskan bahwa:

*“Saya sendiri cukup mendukung ya cuma banyak masyarakat yang justru menolak program ini, jadi kalau bisa kedepannya mungkin bantuan program SANIMAS-*IDB* ini dalam bentuk prasarana yang lain ya selain IPAL, manatau bisa masing-masing rumah gitu jadi tidak perlu ada sambungan-sambungannya dan juga kami merasa program ini kurang jelas Dinas mana saja yang bertanggung jawab karena tidak ada yang pernah turun langsung kesini” (22 November 2020, di Rumah Ibu Nona).*

Dari hasil wawancara penulis diatas mengenai item adanya tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, penulis menganalisis bahwa masyarakat mendukung program SANIMAS-*IDB* untuk dilaksanakan lagi di Kelurahan Lembah Sari namun dengan pembangunan sarana fisik yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil observasi penulis mengenai item dukungan masyarakat mengenai pelaksanaan program SANIMAS-*IDB* dapat dijelaskan bahwa pada saat awal akan dilaksanakannya program tersebut banyak masyarakat yang menolak pelaksanaan program karena tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga sulit memahami maksud dan tujuan kebijakan secara jelas, namun seiring berjalannya waktu masyarakat mulai menerima program tersebut karena sudah merasakan manfaat dari program SANIMAS-*IDB* meskipun pemilihan sarana fisik program dinilai kurang efektif.

### **C. Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Program SANIMAS-*IDB* Di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir**

Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dilapangan dengan informan dan key informan program SANIMAS-*IDB* di Kelurahan Lembah Sari, masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya, adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana baik dari Dinas Perkrim maupun dari tim TFL kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti maksud dilaksanakannya program dan menolak adanya program SANIMAS-*IDB*.
2. Kurang optimalnya koordinasi antara pihak pelaksana dari Dinas Perkrim Kota Pekanbaru dengan pelaksana ditingkat Kelurahan seperti LKM, KSM dan KPP ditandai dengan koordinasi hanya terlihat dilakukan saat awal tahap sosialisasi program saja.
3. Sulitnya menyadarkan dan membangun kerjasama antara pelaksana dengan masyarakat agar semua masyarakat di Kelurahan Lembah Sari mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan menyadari manfaat dari program SANIMAS-*IDB* lingkungan hal tersebut terjadi karena pendidikan masyarakat yang rendah.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi program *SANIMAS-IDB* di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir sudah berjalan cukup baik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tentang RPJM 2015-2019 yang mengamanatkan Gerakan 100-0-100 yang artinya 100% akses aman air minum, 0% bebas kekumuhan dan 100% akses sanitasi layak pada akhir 2019 .
2. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan program *SANIMAS-IDB* di Kelurahan Lembah Sari. Adalah sebagai berikut:
  - a. Tidak maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana baik dari Dinas Perkrim maupun dari tim TFL kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti maksud dilaksanakannya program dan menolak adanya program *SANIMAS-IDB*.
  - b. Kurang optimalnya koordinasi antara pihak pelaksana dari Dinas Perkrim Kota Pekanbaru dengan pelaksana ditingkat Kelurahan seperti LKM, KSM dan KPP ditandai dengan koordinasi hanya terlihat dilakukan saat awal tahap sosialisasi program saja.



- c. Sulitnya menyadarkan dan membangun kerjasama antara pelaksana dengan masyarakat agar semua masyarakat di Kelurahan Lembah Sari mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan menyadari manfaat dari program SANIMAS-*IDB* lingkungan hal tersebut terjadi karena pendidikan yang rendah yang menyebabkan masyarakat sulit memahami pentingnya menjaga lingkungan agar dapat hidup sehat dan bersih .



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## B. Saran-Saran

1. Disarankan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dengan kontribusi dengan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup terkait program SANIMAS-*IDB* agar masyarakat mengerti maksud dan tujuan dilaksanakannya program SANIMAS-*IDB* dengan jelas dan agar tidak ada yang menolak pelaksanaan program tersebut.
2. Diharapkan kepada Dinas Perkrim dan Tim TFL agar memperbaiki koordinasi dalam melaksanakan program SANIMAS-*IDB* agar program tersebut dapat berjalan dengan efektif.
3. Diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari agar mau bekerjasama dengan merubah perilaku hidup bersih dan sehat agar dapat mendorong pelaksanaan program SANIMAS-*IDB*, agar program dapat berjalan lebih baik kedepannya.

## Daftar Kepustakaan

### Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 2008. *Pengelolaan Air Limbah Domestik di DKI Jakarta*. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Chandra, Budiman. 2007. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kedokteran EGC
- Hartoyo, Sri. 2017. *Petunjuk Teknis SANIMAS IDB (ISLAMIC DEVELOPMENT BANK)*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. PT: Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Mandiatun dan Daryanto. 2014. *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gava Medika.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Sanitasi Lingkungan ( Pendidikan Lingkungan Hidup)*. Yogyakarta: Gava Medika.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- \_\_\_\_\_. 2010. *Metode Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifin, Pipin dan Dedej Jubaedah. 2013. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Slamet, Juli Soemirat. 2009. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Susilo, Rahmad K. 2014. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Tresiana, Duadji. 2017. *Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: mLIPPI Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.

### **Jurnal**

- Monalisa, Andriyus & Uyun, R. 2018. *Implementasi Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Studi di Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu)*. Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi.



- Ranggi Ade Febrian. 2018. *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual dan Teoritis)*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi.
- Shella Febrian Saputri. 2018. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Ipal Komunal di Kampung Sanan, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Kota Malang*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yulliana, R. 2019. *Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Bidang Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Terhadap Sosial dan Lingkungan Masyarakat ( Studi di Kelurahan Selatpanjang Selatan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti)*. Universitas Islam Riau.
- Yuslaini, N.,& Juliana, S. 2019. *Evaluasi Program Pendamping Desa di Kabupaten Bengkalis*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, Vol 5. No 2.
- Zudika Dm Manullang. 2014. *Evaluasi Dampak Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan)*. Universitas Sumatera Utara. Medan.

### **Dokumen**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Air Limbah Domestik



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
الجامعة الإسلامية الرiauية

Alamat : Jalan Kahrudin Nasution No. 113 Marpoyan Pekanbaru, Riau, Indonesia 28264  
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fispol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI**

Nomor : 1723 /A-UIR/5-FS/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Rezenita Anggoro Prasetyari  
NPM : 177310068  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT-ISLAMIC DEVELOPMENT BANK DI KOTA PEKANBARU (STUDI DI KELURAHAN LEMBAH SARI KECAMATAN RUMBAI PESISIR)  
Persentase Plagiasi : 10 %  
Jumlah Halaman : 124 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)  
Status : Lulus

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 25 Mei 2021

Hormat Kami,  
Wakil Dekan Bid. Akademik

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si**  
NPK. 970702230

